



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018 – 2023

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telepon 024-8311174 (20 saluran) Fax. 024-8311266
Semarang-Jawa Tengah
Tahun 2018



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Dr. Ir. SRI PURYONO KARTO SOEDARMO, MP

NIP : 19600229 198603 1 004

Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

Berdasar SK Presiden Republik Indonesia Nomor 172/M Tahun 2014 tanggal 19 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, bertugas untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP

Pembina Utama

NIP. 19600229 198603 1 004

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2023.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan keseluruhan Program dan Kegiatan pada sembilan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama periode lima tahunan.

Rencana Strategis ini agar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tiap tahunnya selama periode tahun 2018-2023, serta dapat dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Semarang,

SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ir. SRI PURYONO KS, MP
Pembina Utama
NIP. 19600229 198603 1 004

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
Daftar Gambar	iv	
Daftar Tabel	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	1
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2016	7
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018	7
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	56
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda	70
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	73
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	120
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	121
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	121
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda Provinsi Jawa Tengah .	121
	3.3. Program dan Kegiatan	126
BAB IV	PENUTUP	158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja TA 2016 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	8
Tabel 2.1.a	Rekapitulasi Indikator Kegiatan yang Tidak Mencapai Target	41
Tabel 2.1.b	Rekapitulasi Indikator Kegiatan yang Mencapai Target ...	43
Tabel 2.1.c	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja TA 2016 Kegiatan yang Target Tercapai > 100%	54
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	56
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	73
Tabel 3.1.	Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah	126

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya perwujudan visi-misi dan program kerja Gubernur menuntut manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan organisasi yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah khususnya melalui Pengkoordinasian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan Setda untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Tugas dan fungsi Setda tersebut merupakan instrumen pengendali atas upaya pencapaian target-target pembangunan, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah seperti halnya perencanaan pembangunan nasional disusun secara berjangka. Terdapat tiga bentuk perencanaan berjangka, yaitu: perencanaan berjangka dua puluh tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan berjangka lima tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Guna menjabarkan RPJMD, maka Sekretariat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Setda. Renstra tersebut merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan daerah pada khususnya sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pelayanan Setda dan pada umumnya sebagai penjabaran atas pembangunan jangka menengah daerah lima tahun ke depan di lingkup Setda.

Kualitas Renstra Setda sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh biro lingkup Setda dalam memahami isu strategis dan permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Renstra Setda menyajikan tiga aspek utama, yaitu sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, strategi dan arah kebijakan pencapaiannya, serta perumusan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; penerjemahan kewenangan melalui tugas dan fungsi Setda sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018; perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; serta penetapan target kinerja dan proyeksi kebutuhan pembiayaannya.

Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum

- 1). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- 7). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 8). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 10). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 - 11). Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 12). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - 13). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - 14). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 - 15). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
 - 16). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 17). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
 - 18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 - 19). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 21). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 - 22). Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.a. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman bagi seluruh Biro di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2018 – 2023 ini dimaksudkan untuk:

- 1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- 3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan.
- 4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun;
- 5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: Tahun 2018 – 2023.

1.3.b. Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2018 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki,

dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Tujuan disusunnya Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.
- 2). Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3). Sebagai dasar pengukuran kinerja 5 (lima) tahun mendatang bagi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4). Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 5). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

2.1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

2.1.a. Sekretaris Daerah membawahkan:

- 1). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a). Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama membawahkan:
 - (1). Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - (b). Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pertanahan;
 - (c). Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
 - (d). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - (2). Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Urusan Pemerintahan Dan Standar Pelayanan Minimal;
 - (b). Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Peningkatan Kapasitas Daerah; dan
 - (c). Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (3). Bagian Kerja sama, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Kerja sama Dalam Negeri;
 - (b). Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
 - b). Biro Hukum, membawahkan:
 - (1). Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - (b). Sub Bagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur; dan
 - (c). Sub Bagian Pengkajian Dan Sosialisasi Produk Hukum.
 - (2). Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Sengketa Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - (b). Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - (3). Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;

- (b). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
 - (c). Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- c). Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - (1). Bagian Keagamaan, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama;
 - (b). Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - (2). Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan;
 - (b). Sub Bagian Kesehatan; dan
 - (c). Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
 - (3). Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan Dan Olah Raga, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - (b). Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
 - (c). Sub Bagian Kepemudaan Dan Olah Raga.
- 2). Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan:
 - a). Biro Perekonomian, membawahkan:
 - (1). Bagian Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Perindustrian Dan Perdagangan;
 - (b). Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - (2). Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah bidang Keuangan; dan
 - (b). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah bidang Jasa Dan Produksi.
 - (3). Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Perhubungan; dan
 - (b). Sub Bagian Penanaman Modal Dan Pariwisata.
 - b). Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - (1). Bagian Infrastruktur, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
 - (b). Sub Bagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (2). Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
 - (b). Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
 - (3). Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Ketahanan Pangan;
 - (b). Sub Bagian Kelautan Dan Perikanan; dan
 - (c). Sub Bagian Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan.
- c). Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
- (1). Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan ;
 - (b). Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - (c). Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2). Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - (b). Sub Bagian Pengelolaan LPSE; dan
 - (3). Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - (b). Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 3). Asisten Administrasi, membawahkan:
- a). Biro Organisasi, membawahkan:
 - (1). Bagian Kelembagaan, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - (b). Sub Bagian Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - (c). Sub Bagian Analisis Dan Formasi Jabatan; dan
 - (d). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
 - (2). Bagian Tata Laksana Dan Pelayanan Publik, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Tatalaksana;
 - (b). Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (3). Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
 - (b). Sub Bagian Reformasi Birokrasi; dan
 - (c). Sub Bagian Kepegawaian.
- b). Biro Umum, membawahkan:
 - (1). Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Sarana Dan Prasarana;
 - (b). Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga;
 - (c). Sub Bagian Keuangan; dan
 - (d). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - (2). Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Liputan Dan Dokumentasi;
 - (b). Sub Bagian Publikasi Dan Hubungan Media; dan
 - (c). Sub Bagian Protokol.
 - (3). Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur;
 - (b). Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
 - (c). Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan; dan
 - (d). Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.
- c). Biro Administrasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
 - (1). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya;
 - (b). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi; dan
 - (c). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
 - (2). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - (b). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
 - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - (3). Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
 - (a). Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

(b). Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan

(c). Sub Bagian Penyusunan Program.

2.1.2. Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif.

2.1.3. Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Guna melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.a. Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

2.1.3.b. Tugas dan Fungsi Biro Hukum

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2.1.3.c. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah raga;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah raga; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2.1.3.d. Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya

ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah Badan Usaha Milik Daerah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- c. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- d. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya manusia badan usaha milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

2.1.3.e. Tugas dan Fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;

- b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- c. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

2.1.3.f. Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

(1). Tugas

Menyusun pengekoordinasian penyusunan kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi Pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi Pengadaan barang/jasa.

(2). Fungsi

- a. Pengekoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/jasa, pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa;
- c. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi Pengadaan barang/jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/Jasa, dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.g. Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

2.1.3.h. Tugas dan Fungsi Biro Umum

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- d. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.1.3.i. Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah;

- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan didukung sumberdaya antara lain:

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 562 Pegawai Negeri Sipil (data PNS per oktober 2018), terdiri dari Eselon I.b 1 orang, Eselon II.a 2 orang, Eselon II.b 8 orang, Eselon III.a sebanyak 22 orang dan Eselon IV.a sebanyak 68 orang serta JFU 461 orang. Berdasarkan golongan, maka PNS Sekretariat Daerah terdiri dari golongan I sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 96 orang, golongan III sebanyak 387 orang dan golongan IV sebanyak 74 orang yang rata-rata mempunyai pengetahuan di bidang Pemerintahan, hukum, informatika, dan manajemen.

Secara rinci data PNS pada per Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi Bulan Januari Tahun 2018

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN							GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	JML	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	JML
1	Sekretaris Daerah	1		1						1	1				1	1				1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0		0						0										
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1		1						1					1		1			1
4	Asisten Administrasi	1		1						1					1		1			1
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	24	30	54	0	1	5	0	27	21		0	3	40	11	0	1	3	8	12
6	Biro Hukum	27	15	42	1	0	3	3	21	14		0	2	31	9	0	1	3	9	13
7	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	11	27	38	1	0	4	1	18	14		0	1	30	7	0	1	2	9	12
8	Biro Perekonomian	26	16	42	0	0	6	2	20	14		0	4	28	10	0	1	3	6	10
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	19	23	42	1	0	5	3	15	17		0	2	31	9	0	1	3	7	11
10	Biro Kesra	24	22	46	0	0	1	2	28	15		0	2	37	9	0	1	3	8	11

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN							GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	JML	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	JML
11	Biro Organisasi	29	25	54	0	0	6	2	24	18		0	2	39	13	0	1	3	10	14
12	Biro Umum	151	91	243	13	20	97	15	84	13		8	80	151	3	0	1	2	11	14
13	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *)																			
JUMLAH		313	249	562		21	127	28	237	128	1	8	96	387	74	1	10	22	68	97

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.	KODE bidang BARANG	NAMA bidang BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	01.01	TANAH	18
2	02.02	ALAT-ALAT BESAR	39
3	02.03	ALAT-ALAT ANGKUT	327
4	02.04	ALAT-ALAT BENGKEL	2
5	02.05	ALAT-ALAT PERTANIAN	-
6	02.06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	19.268
7	02.07	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	2.057
8	02.08	ALAT KEDOKTERAN	46
9	02.09	ALAT LABORATORIUM	-
10	02.10	ALAT KEAMANAN	10
11	03.11	BANGUNAN GEDUNG	44
12	03.12	BANGUNAN MONUMEN	-
13	04.13	JALAN DAN JEMBATAN	-
14	04.14	BANGUNAN AIR IRIGASI	-
15	04.15	INSTALASI	58
16	04.16	JARINGAN	-
17	05.17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	14.084
18	05.18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	73
19	05.19	HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN	-
20	06.11	BANGUNAN GEDUNG	-
21	06.12	BANGUNAN MONUMEN	-

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan OPD merupakan capaian kinerja OPD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis 2013-2018 sebagaimana table berikut:

TABEL 2.1.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					OPD Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																			
	a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang Disusun (dokumen perda)				17	7	10	12	15	17	7	10	12	15	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum																			
	a. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Bersertifikasi ISO (unit)				22 UPP	25 UPP	27 UPP	31	34	22 UPP	25 UPP	27 UPP	31	34	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemotdaker; Biro Adm. Bangsa; Biro ISDA;
	b. Jumlah UPP yang Dilakukan Pengukuran IKM (unit)				12 UPP	16 UPP	20 UPP	43	28	12 UPP	16 UPP	20 UPP	43	28	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian; Biro Kesra;

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					OPD Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	c. Perapatan Pilar Batas (pilar)				50 Pilar	100 pilar	50 Pilar	50	50	50 Pilar	100 pilar	50 Pilar	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi; Biro Umum.
	d. Perawatan Pilar Batas (pilar)				0	135	0	80	80	0	135	0	80	80		100%		100%	100%	
	e. Pengendalian Kinerja SKPD/OPD				48 SKPD	48	48	48	48	48 SKPD	48	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	
	f. Penyusunan LKPJ (dokumen)				1 Dok LKPJ	1 dok LKPJ	1	1	1	1 Dok LKPJ	1 dok LKPJ	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
	g. Sinergitas Penyelenggaraa n Pemerintahan, Kemasyarakatan , dan Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota				3 Bakorwil	3 Bakorwil	3 Bakorwil	Prov, 35 Kab/Kota	Prov, 35 Kab/Kota	3 Bakorwil	3 Bakorwil	3 Bakorwil	Prov, 35 Kab/Kota	Prov, 35 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
	a. Laporan LPPD Provinsi (laporan)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemotdaker
	b. Pemetaan Kapasitas Pemerintahan				5	10	5	7	7	5	10	5	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					OPD Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Daerah Kabupaten/Kota (kab/kota)																			
	c. Desk Pilkada				3	21	7	7 Kab/Kota	1 Provinsi, 7 Kab/Kota	3	21	7	7 Kab/Kota	1 Provinsi, 7 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah																			
	a. Negara, MoU dan Perjanjian Teknis (PT)				4 MoU, 4 Kegiatan	9	5	2 negara, 5 PT	4 MoU, 8 Negara, 15 PT	4 MoU, 4 Kegiatan	9	5	2 negara, 5 PT	4 MoU, 8 Negara, 15 PT	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemotdaker
	b. Naskah Kerjasama (NK)				79	154	51	50	182 NK	79	154	51	50	182 NK	100%	100%	100%	100%	100%	

TABEL 2.2.

ANGGARAN DAN REALIASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BIRO BANGDA																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	100.000.000	40.000.000	30.000.000	40.000.000	119.117.950	95.287.000	37.257.422	30.000.000	39.834.900	79,41	95,29	93,14	100	99,59	-21%	-27%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	450.000.000	400.000.000	372.500.000	439.750.000	450.000.000	373.307.515	384.873.836	350.492.624	390.884.055	446.717.547	82,96	96,22	94,09	88,89	99,27	1%	-11%
3	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	900.000.000	900.000.000	753.827.000	750.000.000	850.000.000	877.246.101	882.231.166	738.305.300	730.982.603	838.599.295	97,47	98,03	97,94	97,46	98,66	-1%	-14%
4	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	691.500.000	658.000.000	800.000.000	967.601.600	816.012.569	666.614.962	614.039.166	791.799.500	96,76	81,60	96,40	93,32	98,97	-4%	-20%
5	Kegiatan Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan	650.000.000	625.000.000	578.535.000	565.000.000	670.000.000	641.716.550	618.384.550	561.492.840	528.069.500	667.361.750	98,73	98,94	97,05	93,46	99,61	0%	-12%
6	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah	1.000.000.000	943.000.000	692.250.000	720.000.000	835.000.000	962.728.300	859.413.650	686.974.000	687.804.750	814.964.850	96,27	91,14	99,24	95,53	97,60	-5%	-18%
7	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK di Provinsi Jawa tengah	375.000.000	250.000.000	193.125.000	220.000.000	300.000.000	363.702.956	246.832.476	182.820.850	211.680.250	285.876.180	96,99	98,73	94,66	96,22	95,29	-1%	-29%
8	Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di	300.000.000	300.000.000	135.923.000	66.000.000	0	277.565.800	193.117.000	131.910.960	54.029.600	0	92,52	64,37	97,05	81,86	0	-35%	-40%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hukum	100.000.000	150.000.000	25.000.000	47.500.000	85.000.000	100.000.000	150.000.000	24.843.500	47.500.000	85.000.000	100,00	100,00	99,37	100,00	100	29%	11%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Hukum	300.000.000	350.000.000	300.000.000	285.000.000	305.000.000	289.758.700	348.409.500	298.104.050	285.000.000	305.000.000	96,59	99,55	99,37	100,00	100	-2%	-8%
3	Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat	600.000.000	600.000.000	405.000.000	0	0	599.937.200	596.415.552	401.253.000	0	0	99,99	99,40	99,07	-	-	-16%	-17%
4	Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah	1.300.000.000	1.310.000.000	1.411.111.000	1.448.750.000	1.870.000.000	1.299.674.100	1.303.018.000	1.410.610.000	1.444.705.500	1.870.000.000	99,97	99,47	99,96	99,72	100	7%	-2%
5	Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	825.000.000	1.011.111.000	783.750.000	1.050.000.000	897.400.000	803.977.200	941.998.100	769.745.800	1.049.500.000	99,71	97,45	93,16	98,21	99,95	5%	-11%
6	Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas Tingkat Provinsi Jawa Tengah.	250.000.000	266.000.000	379.310.000	0	0	247.395.000	258.321.800	365.623.900	0	0	98,96	97,11	96,39	-	-	24%	23%
7	Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	602.450.000	368.000.000	349.024.000	332.500.000	0	570.902.000	366.442.300	342.979.850	331.181.500	0	94,76	99,58	98,27	99,60	-	-16%	-15%
8	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi Dan Advokasi Hukum	650.000.000	590.000.000	241.880.000	878.750.000	0	650.000.000	590.000.000	235.248.500	875.500.000	0	100,00	100,00	97,26	99,63	-	65%	68%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Produksi	150.000.000	125.000.000	113.068.000	71.250.000	200.000.000	150.000.000	125.000.000	113.000.000	71.250.000	194.800.000	100,00	100,00	99,94	100,00	97,40	29%	-1%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Produksi	350.000.000	620.000.000	600.000.000	366.937.000	700.000.000	349.930.960	574.957.848	587.802.588	360.396.200	650.898.225	99,98	92,74	97,97	98,22	92,99	31%	-2%
3	Kegiatan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	275.000.000	250.000.000	274.330.000	190.000.000	0	274.996.450	247.160.000	272.650.850	163.551.150	0	100,00	98,86	99,39	86,08	-	-10%	-13%
4	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air	250.000.000	217.000.000	187.500.000	1.898.500.000	0	249.519.000	202.224.000	182.326.000	1.635.546.606	0	99,81	93,19	97,24	86,15	-	295%	256%
5	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100.000.000	170.000.000	0	0	0	100.000.000	162.715.000	0	0	0	100,00	95,71	-	-	-	70%	63%
6	Kegiatan koordinasi pembinaan perikanan tangkap sumberdaya kelautan	100.000.000	100.000.000	200.000.000	150.000.000	0	100.000.000	92.780.000	165.121.900	132.088.392	0	100,00	92,78	82,56	88,06	-	25%	17%
7	Kegiatan koordinasi pembinaan peningkatan produksi perikanan	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	0	99.275.000	98.000.000	134.915.000	129.602.065	0	99,28	98,00	89,94	86,40	-	17%	11%
8	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan	200.000.000	170.000.000	625.000.000	516.500.000	0	199.000.000	166.735.000	572.013.699	499.606.330	0	99,50	98,08	91,52	96,73	-	78%	71%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pengawasan Sarana Produksi																	
9	Kegiatan Penyelenggaraan SAE	100.000.000	1.500.000.000	100.000.000	1.031.000.000	0	100.000.000	1.457.143.000	73.101.000	946.468.200	0	100,00	97,14	73,10	91,80	-	746%	819%
10	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian.	500.000.000	0	0	0	0	499.300.000	0	0	0	0	99,86	-	-	-	-	-	-
11	Kegiatan koordinasi bantuan pangan dan dana talangan.	1.400.000.000	0	0	0	0	1.397.262.000	0	0	0	0	99,80	-	-	-	-	-	-
12	Kegiatan koordinasi pembinaan kelembagaan pertanian	1.900.000.000	580.555.000	266.720.000	800.000.000	0	1.898.110.000	568.808.800	182.934.100	783.735.800	0	99,90	97,98	68,59	97,97	-	25%	64%
13	koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	200.000.000	200.000.000	253.575.000	190.000.000	0	199.990.000	190.552.300	222.281.918	173.671.100	0	100,00	95,28	87,66	91,41	-	1%	-3%
14	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan kehutanan dan Pelestarian Sumberdaya Hutan.	400.000.000	0	0	261.250.000	0	398.395.200	0	0	253.473.330	0	99,60	-	-	97,02	-	-	-
15	Kegiatan Pengelolaan Pertambangan Kabupaten/Kota dengan Provinsi;	150.000.000	0	187.500.000	0	0	150.000.000	0	185.807.000	0	0	100,00	-	99,10	--	-	-	-
16	Kegiatan koordinasi pengembangan energi daerah dan energi pedesaan	175.000.000	182.000.000	0	0	0	175.000.000	170.112.200	0	0	0	100,00	93,47	-	-	-	4%	-3%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Hemat Energi dan Air	175.000.000	138.000.000	0	0	0	175.000.000	131.300.000	0	0	0	100,00	95,14	-	-	-	-21%	-25%
18	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian	0	210.000.000	569.600.000	250.000.000	0	0	202.188.500	473.684.672	247.215.676	0	-	96,28	83,16	98,89	-	58%	43%
19	Kegiatan koordinasi Pengadaan Cadangan pangan dan dana talangan.	0	1.000.000.000	0	0	0	0	992.939.872	0	0	0	-	99,29	-	-	-	-	0%
20	Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan	0	449.445.000	333.457.000	0	0	0	431.253.825	325.513.190	0	0	-	95,95	97,62	-	-	-26%	-25%
21	Kegiatan Koordinasi pengelolaan pertambangan Kab/Kota dengan Provinsi	0	285.000.000	0	165.000.000	0	0	270.726.800	0	157.576.000	0	-	94,99	-	95,50	-	-	0%
22	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	0	228.000.000	135.630.000	148.500.000	0	0	206.370.727	134.730.000	144.511.300	0	-	90,51	99,34	97,31	-	-16%	-14%
23	Kegiatan Koordinasi Bidang Energi	0	0	278.620.000	165.000.000	0	0	0	278.167.000	157.180.050	0	-	-	99,84	95,26	-	-41%	-43%
24	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	392.367.450	-	-	-	-	98,09	-	-
25	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	337.628.289	-	-	-	-	96,47	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental - (Bina Mental)	170.000.000	200.000.000	120.000.000			159.000.000	150.000.000	115.300.100			93,53	75,00	96,08			-11%	-14%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Mental - (Bina Mental)	375.000.000	550.000.000	440.381.000			369.883.658	531.152.262	411.819.676			98,64	96,57	93,51			13%	11%
3	Kegiatan Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan	1.525.000.000	1.536.000.000				1.307.194.300	1.359.953.400				85,72	88,54				1%	4%
4	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan (Dikdas)	350.000.000	325.000.000				350.000.000	214.167.000				100,00	65,90				-7%	-39%
5	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan (Dikmen)	300.000.000	275.000.000				299.865.000	186.962.000				99,96	67,99				-8%	-38%
6	Pembinaan dan penyuluhan P4GN bagi tokoh agama dan masyarakat	250.000.000	285.000.000				206.071.000	206.204.920				82,43	72,35				14%	0%
7	Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	515.000.000	1.285.000.000				473.121.107	1.245.177.850				91,87	96,90				150%	163%
8	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Hibah Kegamaan	507.000.000	422.500.000	1.792.595.000			415.131.590	339.213.248	1.614.725.150			81,88	80,29	90,08			154%	179%
9	Kegiatan Koordinasi Pengembangan	250.000.000	240.575.000				241.878.600	230.317.500	-			96,75	95,74				-4%	-5%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Keolahragaan																	
10	Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan	2.300.000.000	2.300.000.000	1.358.180.000			1.090.638.120	1.429.591.752	1.257.079.200			47,42	62,16	92,56			-20%	10%
11	Koordinasi Pengembangan Kepemudaan	250.000.000	779.450.000				209.358.400	259.393.400				83,74	33,28				212%	24%
12	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	350.000.000	307.295.000				254.594.500	283.856.700				72,74	92,37				-12%	11%
13	Kegiatan pengembangan kesenian dan nilai budaya	750.000.000	876.000.000	693.425.000			673.406.025	829.868.750	689.756.250			89,79	94,73	99,47			-2%	3%
14	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan			1.267.800.000					1.124.846.443					88,72			-	-
15	Kegiatan Koordinasi P4GN			246.369.000					246.364.750					100,00			-	-
BIRO BINA SOSIAL																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Sosial - (Bina Sosial)	75.000.000	125.000.000	60.000.000			75.000.000	124.123.350	60.000.000			100,00	99,30	100,00			7%	7%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Sosial - (Bina Sosial)	300.000.000	400.000.000	287.771.000			299.792.950	380.984.763	285.374.200			99,93	95,25	99,17			3%	1%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Kegiatan Peningkatan koordinasi penanggulangan penyakit menular	275.000.000	285.000.000	177.532.000			270.918.250	270.748.700	175.574.550			98,52	95,00	98,90			-17%	-18%
4	Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Jawa Tengah.	133.000.000	190.000.000	144.900.000			129.135.200	177.525.800	143.833.000			97,09	93,43	99,26			10%	9%
5	Kegiatan Fasilitasi peningkatan, kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	250.000.000	300.000.000	221.577.000			244.028.150	273.958.700	215.582.250			97,61	91,32	97,29			-3%	-5%
6	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia	200.000.000	300.000.000	185.211.000			191.947.700	257.671.500	185.203.750			95,97	85,89	100,00			6%	3%
7	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi P4GN	225.000.000	300.000.000	249.500.000			220.583.500	246.213.500	249.447.750			98,04	82,07	99,98			8%	6%
8	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan	200.000.000	1.170.000.000	823.028.000			198.919.400	859.073.820	419.987.253			99,46	73,43	51,03			228%	140%
9	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan	150.000.000					136.315.000					90,88					-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	dan Anak Sewilayah MPU (Mitra Praja Utama)																	
10	Kegiatan Peningkatan peran serta anak dalam pembangunan	225.000.000	225.000.000	112.542.000			221.189.600	187.085.001	106.940.000			98,31	83,15	95,02			-25%	-29%
11	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	300.000.000	280.000.000	691.335.000			289.177.000	263.099.046	684.690.000			96,39	93,96	99,04			70%	76%
12	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan	200.000.000	200.000.000	176.875.000			195.791.800	162.415.900	170.407.000			97,90	81,21	96,34			-6%	-6%
13	Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	200.000.000	190.000.000	63.750.000			197.011.300	175.148.600	63.547.500			98,51	92,18	99,68			-36%	-37%
14	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	249.000.000	230.000.000	199.980.000			191.310.000	192.956.442	181.747.084			76,83	83,89	90,88			-10%	-2%
15	Kegiatan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK	124.500.000	125.000.000	83.596.000			120.104.700	103.670.500	82.318.500			96,47	82,94	98,47			-16%	-17%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16	Kegiatan Pembinaan dan monitoring yayasan, lembaga dan kelompok sosial lainnya	500.000.000	375.000.000				481.781.000	352.623.600				96,36	94,03				-25%	-27%
17	Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	150.000.000	375.000.000				148.884.500	334.104.050				99,26	89,09				150%	124%
18	Kegiatan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi pemantauan lapangan dan pemantauan pemberian bantuan bencana	250.000.000					246.376.200					98,55					-	-
19	Kegiatan koordinasi bidang ketransmigrasian	100.000.000	80.000.000	76.972.000			95.573.620	79.113.300	72.247.999			95,57	98,89	93,86			-12%	-13%
20	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking		150.000.000	69.873.000				143.845.569	69.672.955				95,90	99,71			-53%	-52%
21	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialiasi Dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta			278.363.000					277.542.328					99,71			-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial																	
22	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana			259.695.000					249.936.880					96,24			-	-
BIRO KESRA																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental	0	0	0	140.000.000	150.000.000	0	0	0	117.473.640	149.832.000	-	-	-	83,91	99,89	7%	-33%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Mental	0	0	0	305.400.000	400.000.000	0	0	0	282.337.234	258.468.597	-	-	-	92,45	64,62	31%	-52%
3	Kegiatan pengembangan kesenian dan nilai budaya				654.000.000	1.340.000.00				618.623.300	1.305.325.440				94,59	97,41	105%	-6%
4	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan	0	0	0	907.000.000	1.300.000.00	0	0	0	848.767.900	1.166.197.146	-	-	-	93,58	89,71	10%	-32%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	192.699.300	194.497.100	-	-	-	96,35	97,25	0%	-45%
6	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anti Narkoba	0	0	0	85.000.000	0	0	0	0	79.792.750	0	-	-	-	93,87	-	-100%	-100%
7	Koordinasi peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	0	0	0	161.500.000	200.000.000	0	0	0	156.326.366	195.929.650	-	-	-	96,80	97,96	24%	-40%
8	Koordinasi peningkatan kesehatan pada kelompok lansia	0	0	0	123.500.000	150.000.000	0	0	0	114.446.000	147.619.800	-	-	-	92,67	98,41	21%	-43%
9	Kegiatan Koordinasi P4GN	0	0	0	316.350.000	325.000.000	0	0	0	238.203.596	319.387.900	-	-	-	75,30	98,27	3%	-22%
10	Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	0	0	0	8.480.000.00 0	3.000.000.00 0	0	0	0	7.500.167.30 9	2.664.925.300	-	-	-	88,45	88,83	-76%	-86%
11	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	0	0	0	209.000.000	215.000.000	0	0	0	189.448.700	201.298.332	-	-	-	90,65	93,63	3%	-22%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
12	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana	0	0	0	209.000.000	215.000.000	0	0	0	166.001.980	179.805.200	-	-	-	79,43	83,63	3%	-29%
13	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan	0	0	0	498.500.000	215.000.000	0	0	0	225.449.900	200.098.350	-	-	-	45,23	93,07	-57%	-54%
14	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	0	0	0	115.000.000	140.000.000	0	0	0	107.087.550	130.554.761	-	-	-	93,12	93,25	22%	-30%
15	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	0	0	0	123.000.000	150.000.000	0	0	0	114.365.550	143.684.189	-	-	-	92,98	95,79	22%	-75%
16	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	0	0	0	190.000.000	220.000.000	0	0	0	154.377.000	189.562.500	-	-	-	81,25	86,16	16%	-32%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Kegiatan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK	0	0	0	110.000.000	200.000.000	0	0	0	97.436.100	172.762.250	-	-	-	88,58	86,38	82%	-79%
18	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan	0	0	0	71.000.000	131.000.000	0	0	0	69.210.000	125.649.300	-	-	-	97,48	95,92	85%	53%
19	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	0	0	0	285.000.000	250.000.000	0	0	0	259.194.300	247.827.350	-	-	-	90,95	99,13	-12%	-57%
20	Kegiatan Pengembangan Sinergitas dan Evaluasi Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	346.000.000	500.000.000	0	0	0	340.311.000	494.641.000	-	-	-	98,36	98,93	45%	-34%
21	Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan	0	0	0	1.462.000.000	1.750.000.000	0	0	0	1.427.987.200	1.738.391.280	-	-	-	97,67	99,34	20%	-31%
22	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	142.351.900	-	-	-	-	94,90	-	-
23	Kegiatan koordinasi bidang ketransmigrasian	0	0	0	0	215.000.000	0	0	0	0	169.321.940	-	-	-	-	78,75	-	-
BIRO ORGANISASI																		
1	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis	75.000.000	100.000.000	85.893.000	64.660.000	93.750.000	75.000.000	100.000.000	85.891.000	64.365.900	92.703.150	100,00	100,00	100,00	99,55	98,88	10%	-4%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kantor Biro Organisasi dan Kepegawaian																	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Biro Organisasi dan Kepegawaian	350.000.000	750.000.000	418.750.000	216.360.000	320.000.000	305.233.200	519.947.000	404.256.000	211.945.651	294.352.789	87,21	69,33	96,54	97,96	91,99	15%	-2%
3	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1.618.800.000 0	1.488.950.000 0	937.500.000	482.197.000	850.000.000	1.486.763.000 0	1.242.957.400 0	935.982.720	481.614.950	807.259.950	91,84	83,48	99,84	99,88	94,97	-2%	-30%
4	Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000	635.800.000	300.000.000	206.647.000	450.000.000	550.000.000	559.166.000	299.803.800	199.769.000	442.773.505	100,00	87,95	99,93	96,67	98,39	6%	-26%
5	Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	1.828.450.000 0	785.000.000	525.000.000	516.640.000	700.000.000	1.826.634.000 0	784.910.000	482.981.629	503.379.800	690.453.240	99,90	99,99	92,00	97,43	98,64	-14%	-30%
6	Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota	415.000.000	482.020.000	311.446.000	304.950.000	400.000.000	412.083.300	448.390.500	309.511.400	302.195.200	318.137.700	99,30	93,02	99,38	99,10	79,53	2%	-8%
7	Kegiatan Pendampingan Penerapan SMM dan Sertifikasi ISO 9001:2008	498.000.000	529.800.000	281.000.000	285.000.000	655.100.000	497.525.200	506.277.000	277.129.300	283.260.400	588.866.700	99,90	95,56	98,62	99,39	89,89	31%	-2%
8	Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	290.500.000	344.700.000	372.500.000	316.350.000	450.000.000	290.319.800	329.745.700	315.605.896	315.460.950	353.478.350	99,94	95,66	84,73	99,72	78,55	13%	-18%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pemprov. Jateng																	
9	Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	806.680.000	550.000.000	0	378.860.000	800.000.000	760.363.100	366.922.400	0	368.316.000	796.337.950	94,26	66,71	-	97,22	99,54	40%	-48%
10	Kegiatan Konsolidasi Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	500.000.000	624.625.000	265.000.000	247.950.000	0	493.756.300	447.042.850	258.336.149	238.920.783	0	98,75	71,57	97,49	96,36	-	-13%	-20%
11	Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah	348.600.000	416.000.000	300.000.000	361.710.000	390.000.000	348.562.500	384.709.914	276.330.500	339.196.100	356.810.968	99,99	92,48	92,11	93,78	91,49	5%	-11%
12	Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	239.638.000	270.760.000	121.886.000	168.150.000	0	238.554.300	253.279.000	120.805.600	166.841.450	0	99,55	93,54	99,11	99,22	-	-1%	-3%
13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang Ketatalaksanaan	216.862.000	241.120.000	191.073.000	178.125.000	500.000.000	205.787.600	226.907.000	190.766.100	175.002.900	486.749.500	94,89	94,11	99,84	98,25	97,35	41%	7%
14	Kegiatan Evaluasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah	500.000.000	601.200.000	250.000.000	172.212.000	0	499.399.900	435.506.200	249.585.000	170.180.100	0	99,88	72,44	99,83	98,82	-	-23%	-29%
15	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Analis Jabatan	178.750.000	268.425.000	236.089.000	185.930.000	0	177.310.000	125.747.200	232.454.450	180.913.459	0	99,19	46,85	98,46	97,30	-	6%	11%
16	Kegiatan Penyusunan Pola Hubungan Kerja	166.000.000	93.500.000	99.390.000	56.514.000	0	161.509.900	84.022.000	98.286.100	56.514.000	0	97,30	89,86	98,89	100,00	-	-27%	-25%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja	355.500.000	511.500.000	293.500.000	344.375.000	300.000.000	355.425.200	303.767.100	293.459.100	308.074.700	75.258.376	99,98	59,39	99,99	89,46	25,09	1%	-22%
18	Kegiatan Koordinasi Pengembangan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota	279.000.000	330.000.000	274.250.000	293.788.000	0	271.739.200	302.166.116	272.888.400	248.504.000	0	97,40	91,57	99,50	84,59	-	3%	-2%
19	Kegiatan Sistem Manajemen Informasi Organisasi	350.000.000	476.960.000	201.038.000	245.195.000	200.000.000	349.407.100	192.139.650	195.572.972	192.402.700	86.733.750	99,83	40,28	97,28	78,47	43,37	-5%	-25%
20	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Permenpan No. 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi	230.000.000	225.000.000	147.000.000	137.750.000	0	221.245.000	217.652.000	103.537.000	103.109.100	0	96,19	96,73	70,43	74,85	-	-14%	-18%
21	Kegiatan Pengelolaan SIMPEG Setda Prov. Jateng	150.000.000	125.000.000	185.580.000	174.334.000	0	149.450.000	118.364.000	183.216.500	172.312.950	0	99,63	94,69	98,73	98,84	-	9%	9%
22	Kegiatan Sosialisasi Program Bapertarum-PNS	250.000.000	195.000.000	126.725.000	0	0	249.203.000	120.784.300	125.783.400	0	0	99,68	61,94	99,26	-	-	-29%	-24%
23	Kegiatan Peningkatan Disiplin PNS Setda Prov. Jateng	425.000.000	290.000.000	178.200.000	130.910.000	125.000.000	222.627.000	249.928.000	174.948.400	127.234.422	120.491.000	52,38	86,18	98,18	97,19	96,39	-25%	-27%
24	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan PNS Pemprov. Jateng	402.750.000	0	0	0	0	402.564.000	0	0	0	0	99,95	-	-	-	-	-	-
26	Fasilitasi dan penilaian kinerja Pem	0	0	295.680.000	0	0	0	0	289.564.100	0	0	-	-	97,93	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kab/Kota																	
28	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal					200.000.000					157.396.250					78,70	-	-
29	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	180.918.375	-	-	-	-	90,46	-	-
30	Kegiatan pengembangan ketatalaksanaan	0	0	0	0	395.000.000	0	0	0	0	384.772.125	-	-	-	-	97,41	-	-
31	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	197.212.500	-	-	-	-	98,61	-	-
32	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Jateng	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	194.185.700	-	-	-	-	97,09	-	-
BIRO TATA PEMERINTAHAN																		
1	Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	290.500.000	275.000.000	187.130.000			283.584.000	261.194.300	185.234.350			97,62	94,98	98,99			-19%	-18%
2	Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan sebagai Kewenangan	300.000.000	283.000.000	169.500.000			299.173.000	276.373.650	168.048.600			99,72	97,66	99,14			-23%	-23%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Provinsi																	
3	Kegiatan Identifikasi Tanah HP (Hak Pakai) Aset Pemprov Jateng dan Pemetaan Tematik Tanah HGU & Sosialisasi Pengelolaan HGU	350.000.000	329.620.000	235.500.000			349.781.000	291.780.000	235.500.000			99,94	88,52	100,00			-17%	-18%
4	Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa	400.000.000	282.460.000	167.500.000			399.316.400	281.050.200	166.150.000			99,83	99,50	99,19			-35%	-35%
5	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah	400.000.000	388.000.000	290.000.000			399.720.300	385.088.400	289.882.600			99,93	99,25	99,96			-14%	-14%
6	Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	350.000.000	329.700.000	205.000.000			347.375.000	301.868.700	205.000.000			99,25	91,56	100,00			-22%	-23%
7	Kegiatan Koordinasi Tramtib Terpadu	275.000.000	732.750.000	518.000.000			272.000.000	689.369.200	513.333.100			98,91	94,08	99,10			69%	64%
8	Sinergitas Penanganan Ketertiban Lintas Lembaga dan Masyarakat	475.000.000					474.886.500					99,98					-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah	175.000.000	381.790.000	145.176.000			174.372.500	316.279.000	144.516.900			99,64	82,84	99,55			28%	14%
10	Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	520.050.000	977.475.000	527.875.000			508.714.900	773.953.400	514.698.860			97,82	79,18	97,50			21%	9%
11	Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah	225.000.000	377.200.000	193.698.000			224.160.806	315.207.410	189.263.450			99,63	83,57	97,71			9%	0%
12	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	200.000.000	285.000.000	244.620.000			196.145.780	251.159.744	223.500.445			98,07	88,13	91,37			14%	9%
13	Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	200.000.000	150.000.000	93.750.000			198.037.800	128.263.100	86.233.930			99,02	85,51	91,98			-31%	-34%
14	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	275.000.000	295.610.000	150.000.000			268.833.400	290.400.200	147.624.100			97,76	98,24	98,42			-21%	-21%
15	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	250.000.000	216.160.000	131.250.000			242.185.700	149.056.700	107.908.150			96,87	68,96	82,22			-26%	-33%
16	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	285.000.000	381.144.000	527.564.000			284.199.200	336.893.310	522.287.000			99,72	88,39	99,00			36%	37%
17	Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di	175.000.000	200.058.000	112.500.000			170.396.700	96.331.500	94.636.400			97,37	48,15	84,12			-15%	-23%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Daerah																	
18	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Tata Pemerintahan	75.000.000	85.000.000	56.250.000			75.000.000	85.000.000	56.250.000			100,00	100,00	100,00			-10%	-10%
19	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Biro Tata Pemerintahan	300.000.000	350.000.000	188.437.000			298.646.058	285.192.810	169.267.934			99,55	81,48	89,83			-15%	-23%
BIRO OTONOMI DAERAH & KERJASAMA																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	100.000.000	200.000.000	150.000.000		122.000.000	100.000.000	199.997.600	150.000.000		108.468.000	100,00	100,00	100,00		88,91	38%	37%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	300.000.000	600.000.000	625.000.000		605.000.000	298.400.708	554.824.289	624.978.705		587.974.305	99,47	92,47	100,00		97,19	52%	49%
3	Koordinasi percepatan pencapaian SPM	500.000.000	785.150.000	487.500.000		770.300.000	481.505.000	718.350.000	476.898.976		726.432.750	96,30	91,49	97,83		94,31	10%	8%
4	Kegiatan Desk Pilkada Prov. Jawa Tengah.	400.000.000	1.205.000.000	750.000.000		2.000.000.000	385.508.150	777.889.707	721.959.728		1.784.948.676	96,38	64,56	96,26		89,25	82%	47%
5	Kegiatan Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD	1.450.000.000	1.382.780.000	787.500.000		1.190.000.000	1.380.282.928	1.260.595.000	685.187.670		1.084.919.300	95,19	91,16	87,01		91,17	-24%	-27%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing	1.200.000.00 0	2.450.000.00 0	1.788.000.00 0		1.725.000.00 0	1.180.528.90 0	2.396.845.00 0	1.775.675.00 0		1.513.615.000	98,38	97,83	99,31		87,75	39%	39%
7	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota	315.400.000	400.000.000	375.000.000	304.950.000	0	303.282.710	387.049.770	372.143.867	293.335.450	0	96,16	96,76	99,24	96,19	-	10%	12%
8	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah	604.000.000	786.470.000	615.300.000		565.000.000	593.188.000	771.800.000	588.805.750		525.258.600	98,21	98,13	95,69		92,97	4%	3%
9	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri	1.055.000.00 0	900.000.000	1.912.500.00 0		1.600.000.00 0	750.358.910	819.357.148	1.777.902.814		1.219.190.200	71,12	91,04	92,96		76,2	49%	63%
10	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri.	1.530.000.00 0	2.810.400.00 0	1.349.000.00 0		0	743.948.020	2.339.032.168	554.512.977		0	48,62	83,23	41,11		-	16%	69%
11	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Dlam Negeri	672.200.000	755.000.000	566.250.000		0	658.190.660	710.236.885	507.963.270		0	97,92	94,07	89,71		-	-6%	-10%
12	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri		425.200.000	524.200.000		0		410.284.395	474.200.000		0		96,49	90,46		-	23%	16%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	0	0	0	105.093.000	122.000.000	0	0	0	95.232.500	108.468.000	-	-	-	90,62	88,91	16%	-27%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	0	0	0	377.625.000	605.000.000	-	-	-	375.338.675	587.974.305	-	-	-	99,39	97,19	60%	-32%
3	Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah	0	0	0	95.000.000	225.000.000	0	0	0	92.781.600	223.324.900	-	-	-	97,66	99,26	84%	-17%
4	Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	0	0	0	494.000.000	600.000.000	0	0	0	491.283.100	596.886.280	-	-	-	99,45	99,48	11%	-64%
5	Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah	0	0	0	142.500.000	150.000.000	0	0	0	142.138.210	143.921.000	-	-	-	99,75	95,95	5%	-38%
6	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0	0	0	190.000.000	390.000.000	0	0	0	162.807.931	333.744.038	-	-	-	85,69	38,27	105%	-8%
7	Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	0	0	0	95.000.000	125.000.000	0	0	0	92.444.632	118.838.260	-	-	-	97,31	95,07	32%	-24%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	0	0	0	166.250.000	0	0	0	0	115.557.922	0	-	-	-	69,51	-	-	-
9	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	0	0	0	95.000.000	255.000.000	0	0	0	84.895.795	224.862.365	-	-	-	89,36	88,18	168%	31%
10	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0	266.000.000	0	0	0	0	206.174.267	0	-	-	-	77,51	-	-	-
11	Koordinasi percepatan pencapaian SPM	0	0	0	500.000.000	770.300.000	0	0	0	494.493.000	726.432.750	-	-	-	98,90	94,31	54%	-50%
12	Kegiatan Desk Pilkada Prov. Jawa Tengah.	0	0	0	759.050.000	2.000.000.000	0	0	0	746.889.300	1.784.948.676	-	-	-	98,40	89,25	163%	22%
13	Kegiatan Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD	0	0	0	750.000.000	1.190.000.000	0	0	0	649.509.611	1.084.919.300	-	-	-	86,60	91,17	59%	4%
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing	0	0	0	1.600.000.000	1.725.000.000	0	0	0	1.410.078.700	1.513.615.000	-	-	-	88,13	87,75	8%	-90%
15	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota	0	0	0	304.950.000	0	0	0	0	293.335.450	0	-	-	-	96,19	-	-	-
16	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah	0	0	0	500.000.000	565.000.000	0	0	0	458.596.900	525.258.600	-	-	-	91,72	92,97	13%	-58%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2008-2013	0	0	0	299.900.000	1.100.000.000	0	0	0	233.226.600	1.043.600.000	-	-	-	77,77	94,87	267%	217%
18	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri	0	0	0	501.600.000	0	0	0	0	501.471.479	0	-	-	-	99,97	-	-	-
19	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Dlam Negeri	0	0	0	553.750.000	0	0	0	0	552.336.227	0	-	-	-	99,74	-	-	-
20	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri	0	0	0	1.025.050.000	0	0	0	0	726.913.450	0	-	-	-	70,91	-	-	-
21	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri	0	0	0	442.700.000	0	0	0	0	400.918.535	0	-	-	-	90,56	-	-	-
22	Kegiatan Pemanjanaan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Terpadu	0	0	0	0	505.200.000	0	0	0	0	473.126.141	-	-	-	-	93,65	-	-
23	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	0	0	0	0	1.698.400.000	0	0	0	0	1.564.195.698	-	-	-	-	92,1	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
24	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri	0	0	0	0	1.600.000.000	0	0	0	0	1.219.190.200	-	-	-	-	76,2	-	-
BIRO PEREKONOMIAN																		
1	Kegiatan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi dan Kab/Kota.	300.000.000	325.000.000	337.500.000	190.000.000	300.000.000	291.224.300	286.530.300	285.693.164	188.966.640	274.912.733	97,07	88,16	84,65	99,46	91,64	7%	-16%
2	Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal	100.000.000	0	0	0	0	94.703.100	0	0	0	0	94,70	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Promosi	500.000.000	700.000.000	450.000.000	0	0	448.126.900	582.426.640	419.754.782	0	0	89,63	83,20	93,28	-	-	2%	1%
4	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	400.000.000	550.000.000	450.000.000	285.000.000	750.000.000	388.765.900	460.324.400	442.359.575	281.405.000	432.538.300	97,19	83,70	98,30	98,74	57,67	36%	8%
5	Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan.	750.000.000	764.000.000	573.750.000	665.000.000	500.000.000	715.063.700	676.353.653	561.803.150	598.438.900	463.613.125	95,34	88,53	97,92	89,99	92,72	-2%	-5%
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Perekonomian	60.000.000	75.000.000	37.500.000	25.000.000	70.000.000	59.749.100	75.000.000	36.430.800	25.000.000	42.571.000	99,58	100,00	97,15	100,00	60,82	30%	3%
7	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Perekonomian	300.000.000	300.000.000	172.500.000	150.000.000	330.000.000	294.850.780	294.602.908	164.480.277	148.248.900	188.133.550	98,28	98,20	95,35	98,83	57,01	16%	-7%
8	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD	1.450.000.000	1.336.000.000	1.016.250.000	0	0	1.187.514.900	1.084.123.932	815.879.338	0	0	81,90	81,15	80,28	-	-	-16%	-17%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM	525.000.000	400.000.000	300.000.000	189.800.000	800.000.000	501.798.400	314.105.350	282.979.870	188.396.700	783.296.300	95,58	78,53	94,33	99,26	97,91	59%	41%
10	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Desa	200.000.000	250.000.000	225.000.000	142.000.000	850.000.000	198.194.200	249.628.450	221.282.200	141.860.400	628.863.800	99,10	99,85	98,35	99,90	73,98	119%	81%
11	Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pengumpulan Informasi IHT Cukai Ilegal	500.000.000	850.000.000	500.000.000	300.000.000	1.000.000.000	491.800.000	742.373.910	486.849.830	288.222.940	322.851.250	98,36	87,34	97,37	96,07	32,29	56%	-3%
13	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Keuangan	0	0	0	500.000.000	700.000.000	0	0	0	400.869.016	685.074.276	-	-	-	80,17	97,87	40%	-4%
14	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Jasa Produksi	0	0	0	360.000.000	500.000.000	0	0	0	318.128.145	465.378.962	-	-	-	88,37	93,08	39%	-3%
15	Kegiatan Koordinasi Bidang Investasi	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	235.749.494	-	-	-	-	94,3	-	-
16	Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan.	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	463.613.125	-	-	-	-	92,72	-	-
BIRO UMUM																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hubungan Masyarakat	150.000.000	150.000.000	56.250.000	0	900.000.000	127.864.500	102.291.750	55.918.000	0	897.857.200	85,24	68,19	99,41	-	99,76	-31%	-33%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan	450.000.000	450.000.000	375.000.000	0	3.790.000.000	447.277.645	449.751.000	374.597.500	0	3.192.588.604	99,40	99,94	99,89	-	84,24	-8%	-8%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Hubungan Masyarakat																	
3	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum	465.000.000	400.035.000	316.500.000	0	0	404.093.805	359.748.030	277.577.500	0	0	86,90	89,93	87,70	-	-	-17%	-17%
4	Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung/Spot	2.292.379.000	1.980.933.000	1.502.000.000	0	0	1.879.795.000	1.473.252.600	1.177.963.400	0	0	82,00	74,37	78,43	-	-	-19%	-21%
5	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi	150.000.000	147.550.000	150.000.000	0	0	141.608.000	142.140.000	142.386.500	0	0	94,41	96,33	94,92	-	-	0%	0%
6	Kegiatan Pembuatan Buletin/ Majalah/ Tabloid	559.500.000	581.040.000	178.120.000	0	0	544.828.200	546.191.650	178.118.330	0	0	97,38	94,00	100,00	-	-	-33%	-34%
7	Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah	105.000.000	101.295.000	112.500.000	0	0	88.799.400	95.935.000	102.183.000	0	0	84,57	94,71	90,83	-	-	4%	7%
8	Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah	150.000.000	145.995.000	150.000.000	0	0	132.820.000	48.561.500	141.137.000	0	0	88,55	33,26	94,09	-	-	0%	64%
9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi	5.045.504.000	4.025.477.000	2.415.500.000	0	0	4.141.927.500	2.758.574.180	2.238.494.200	0	0	82,09	68,53	92,67	-	-	-30%	-26%
10	Kegiatan rubrik sosialisasi pembangunan Jawa Tengah	188.000.000	483.920.000	0	0	0	178.783.500	347.660.800	0	0	0	95,10	71,84	-	-	-	157%	94%
11	Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan	2.018.617.000	2.311.300.000	2.205.421.000	0	0	1.282.918.100	1.624.800.600	1.493.003.300	0	0	63,55	70,30	67,70	-	-	5%	9%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pembangunan Daerah																	
12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola Perpustakaan	83.000.000	68.180.000	62.250.000	0	0	82.280.000	67.829.900	61.864.800	0	0	99,13	99,49	99,38	-	-	-13%	-13%
13	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi	500.000.000	549.890.000	561.230.000	0	0	493.130.000	474.069.500	487.101.700	0	0	98,63	86,21	86,79	-	-	6%	-1%
14	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	110.000.000	242.650.000	187.500.000	0	0	108.747.500	227.133.800	176.167.000	0	0	98,86	93,61	93,96	-	-	49%	43%
15	Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	166.000.000	173.250.000	151.574.000	0	0	149.872.450	158.246.610	147.354.000	0	0	90,28	91,34	97,22	-	-	-4%	-1%
16	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah/ keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	450.000.000	527.000.000	487.500.000	0	0	410.578.000	505.700.700	454.870.869	0	0	91,24	95,96	93,31	-	-	5%	7%
17	Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah	850.000.000	1.300.000.000	285.270.000	0	0	804.208.400	993.318.700	164.806.750	0	0	94,61	76,41	57,77	-	-	-13%	-30%
	Biro Umum																	
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Umum	1.575.000.000	1.300.000.000	800.000.000	712.500.000	900.000.000	1.178.709.225	1.263.625.900	799.442.750	695.175.325	897.857.200	74,84	97,20	99,93	97,57	99,76	-10%	-21%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Umum	5.610.000.000	5.395.000.000	4.325.000.000	2.034.419.000	3.790.000.000	4.941.570.955	4.272.633.194	3.822.834.378	1.976.939.162	3.192.588.604	88,09	79,20	88,39	97,17	84,24	2%	-29%
3	Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga	225.000.000	253.040.000	142.290.000	380.000.000	400.000.000	199.813.700	187.498.353	117.773.900	315.763.271	321.096.900	88,81	74,10	82,77	83,10	80,27	35%	14%
4	Kegiatan Penataan Inventarisasi Barang di Lingkungan Sekretraiat Daerah Prov. Jateng	125.000.000	0	0	0	0	95.819.200	0	0	0	0	76,66	-	-	-	-	0%	0%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000	200.000.000	125.000.000	89.063.000	185.000.000	192.909.710	170.230.515	118.713.410	89.031.550	172.214.000	96,45	85,12	94,97	99,96	93,09	1%	-25%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.769.108.000	7.840.000.000	6.600.000.000	6.431.500.000	6.500.000.000	6.334.676.590	6.428.080.244	6.015.337.034	5.995.056.680	5.535.029.757	81,54	81,99	91,14	93,21	85,15	-2%	-13%
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	2.137.500.000	1.700.000.000	915.000.000	671.250.000	1.185.000.000	1.360.700.000	928.920.200	697.928.000	590.680.000	1.145.772.000	63,66	54,64	76,28	88,00	96,69	-17%	-29%
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan PNS	388.800.000	0	57.000.000	0	0	276.797.700	0	13.986.750	0	0	71,19	-	24,54	-	-	-	-
9	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	975.000.000	1.131.450.000	524.910.000	522.500.000	700.000.000	905.113.831	997.005.611	504.606.095	501.068.000	666.035.247	92,83	88,12	96,13	95,90	95,15	-1%	-24%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	2.278.445.000	2.440.000.000	2.300.000.000	1.638.750.000	2.580.000.000	2.230.114.000	2.305.449.000	2.236.347.000	1.586.142.020	2.530.210.498	97,88	94,49	97,23	96,79	98,07	7%	-14%
11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	2.344.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	712.500.000	940.000.000	1.558.636.830	1.378.530.370	929.442.700	701.217.200	922.643.600	66,49	68,93	92,94	98,42	98,15	-20%	-32%
12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	470.431.000	488.165.000	300.000.000	213.750.000	300.000.000	470.409.600	451.186.800	299.852.500	213.750.000	297.515.300	100,00	92,43	99,95	100,00	99,17	-6%	-27%
13	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.134.024.000	1.000.000.000	400.000.000	213.750.000	400.000.000	1.066.275.692	933.115.880	392.582.700	210.640.000	391.500.696	94,03	93,31	98,15	98,55	97,88	-8%	-31%
14	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	220.000.000	220.000.000	75.000.000	173.437.000	200.000.000	206.639.000	204.939.000	74.416.500	95.771.100	91.475.000	93,93	93,15	99,22	55,22	45,74	20%	-22%
15	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	8.850.000.000	8.782.000.000	6.675.000.000	6.337.500.000	8.350.000.000	8.820.466.715	8.547.963.960	6.671.285.836	6.335.944.170	8.329.470.500	99,67	97,34	99,94	99,98	99,75	-7%	-19%
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	6.167.852.000	4.924.108.000	5.212.333.000	4.800.000.000	5.925.000.000	5.841.122.250	4.407.040.682	4.808.130.922	4.558.392.920	5.705.145.656	94,70	89,50	92,25	94,97	96,29	0%	-13%
17	Kegiatan Peningkatan Olah Raga dan Seni	2.663.200.000	1.466.300.000	587.000.000	399.000.000	930.000.000	1.626.501.100	1.199.164.850	489.014.700	357.650.700	845.056.000	61,07	81,78	83,31	89,64	90,87	-13%	-39%
18	Kegiatan Penyediaan Pelayanan Tamu	4.200.000.000	3.201.480.000	1.808.750.000	0	0	2.773.157.793	1.203.628.710	1.611.553.979	0	0	66,03	37,60	89,10	-	-	-34%	-11%
19	Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan	499.980.000	500.000.000	100.000.000	0	0	499.969.460	496.376.651	99.890.680	0	0	100,00	99,28	99,89	-	-	-40%	-40%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
20	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.700.000.000	4.745.900.000	6.514.069.000		9.001.000.000	2.621.361.000	4.440.287.200	6.435.429.000		8.931.547.163	97,09	93,56	98,79		99,23	57%	57%
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1.270.000.000	2.526.000.000	1.967.000.000	1.159.125.000	4.830.000.000	1.233.754.500	2.318.211.350	1.753.798.900	1.086.058.877	4.464.990.675	97,15	91,77	89,16	93,70	92,44	78%	-10%
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	350.600.000	385.000.000	300.000.000	283.750.000	500.000.000	334.130.604	306.126.376	288.731.626	274.686.278	473.613.968	95,30	79,51	96,24	96,81	94,72	15%	-18%
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.589.442.000	6.889.450.000	2.235.350.000	2.327.908.000	9.590.000.000	3.390.729.052	6.539.767.982	2.068.967.000	2.210.596.070	9.011.035.830	94,46	94,92	92,56	94,96	93,96	80%	-9%
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	387.000.000	356.000.000	250.000.000	0	0	285.986.437	256.671.039	242.710.116	0	0	73,90	72,10	97,08	-	-	-19%	-8%
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.622.282.000	8.030.080.000	5.300.000.000	3.094.000.000	3.900.000.000	8.040.807.513	5.725.697.728	4.658.465.344	2.873.134.487	3.737.399.509	83,56	71,30	87,90	92,86	95,83	-15%	-32%
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.658.868.000	3.892.775.000	3.500.000.000	1.335.000.000	1.750.000.000	2.915.422.920	2.652.954.520	3.278.364.877	1.252.543.300	1.647.277.360	79,68	68,15	93,67	93,82	94,13	-9%	-19%
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	250.000.000	261.000.000	100.000.000	75.000.000	150.000.000	171.500.000	217.150.000	96.219.000	65.820.000	149.870.000	68,60	83,20	96,22	87,76	99,91	4%	-38%
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	1.398.956.000	2.409.800.000	1.010.000.000	842.500.000	940.000.000	1.233.994.095	2.064.759.238	932.732.954	623.887.000	829.791.100	88,21	85,68	92,35	74,05	88,28	0%	-14%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium	25.000.000	30.000.000	3.000.000	0	0	2.250.000	8.800.000	3.000.000	0	0	9,00	29,33	100,00	-	-	-35%	113%
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	120.000.000	120.000.000	100.000.000	90.000.000	150.000.000	118.400.000	108.230.000	98.499.000	84.690.000	138.452.000	98,67	90,19	98,50	94,10	92,30	10%	-18%
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	160.000.000	105.000.000	75.000.000	0	0	138.000.000	91.925.000	41.710.000	0	0	86,25	87,55	55,61	-	-	-31%	-44%
32	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	5.506.950.000	7.648.680.000	5.936.890.000	3.180.400.000	22.145.000.000	5.071.287.500	6.998.312.000	5.519.616.500	2.949.816.000	21.424.702.840	92,09	91,50	92,97	92,75	96,75	120%	-5%
33	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	1.300.000.000	1.007.095.000	510.350.000	190.000.000	390.000.000	1.177.195.000	884.385.650	464.271.000	97.260.000	357.230.000	90,55	87,82	90,97	51,19	91,60	-13%	-59%
34	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	590.000.000	610.000.000	100.000.000	0	0	478.569.550	426.059.200	84.593.200	0	0	81,11	69,85	84,59	-	-	-40%	-46%
35	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	485.948.000	460.000.000	500.000.000	178.125.000	50.000.000	450.109.250	333.104.780	397.538.700	164.742.000	21.500.000	92,62	72,41	79,51	92,49	43,00	-5%	-22%
36	Kegiatan Peningkatan Capaian Kinerja PNS	-	398.800.000	0	0	0	0	274.737.150	0	0	0	-	68,89	-	-	-	-	-
37	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	-	0	0	4.848.169.000	5.205.000.000	0	0	0	4.019.372.798	3.979.979.612	-	-	-	82,90	76,46	13%	-69%
38	Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Biro Umum	-	0	0	1.261.500.000	1.820.000.000	0	0	0	1.239.153.301	1.692.423.194	-	-	-	98,23	92,99	19%	-45%
39	Kegiatan Rapat Koordinasi	-	0	0	71.250.000	100.000.000	0	0	0	55.470.000	96.017.500	-	-	-	77,85	96,02	40%	-15%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Perencanaan Program Biro Umum																	
40	Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	-	0	0	125.000.000	150.000.000	0	0	0	92.785.000	134.826.693	-	-	-	74,23	89,88	20%	45%
41	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah/ keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	-	0	0	427.500.000	450.000.000	0	0	0	389.650.962	444.051.988	-	-	-	91,15	98,68	5%	-72%
42	Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah	-	0	0	275.000.000	330.000.000	0	0	0	206.621.750	311.454.829	-	-	-	75,14	94,38	20%	-94%
43	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	-	0	0	380.000.000	400.000.000	0	0	0	316.214.912	303.674.445	-	-	-	83,21	75,92	5%	-66%
44	Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	1.900.000.000 0	2.880.000.000 0	0	0	0	1.884.968.69 2	2.872.534.102	-	-	-	99,21	99,74	5%	-40%
45	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	-	0	0	1.300.000.000 0	1.650.000.000 0	0	0	0	1.254.783.78 1	1.340.812.961	-	-	-	96,52	81,26	35%	-45%
46	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan	-	0	0	-	25.000.000	0	0	0		20.808.000	-	-	-		83,23	-	-

Selanjutnya secara rinci, capaian kinerja pelayanan di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

2.3.a. Capaian Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama

Capaian kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dan sinergitas bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 48 OPD dan 35 Kabupaten/Kota.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinergitas bidang tugas Pemerintahan di 48 OPD dan 35 Kabupaten/Kota termasuk Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Peningkatan koordinasi dan sinergitas bidang tugas pelaksanaan Pemerintahan desa di 35 Kabupaten/Kota (2013-2016).
- d. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tertib administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil di 35 Kabupaten/Kota (2013-2016).
- e. Peningkatan penyelesaian konflik pertanahan melalui fasilitasi konflik pertanahan yang terkait dengan fasilitas umum maupun Proyek Strategis Nasional.
- f. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban melalui audiensi unjuk rasa di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
- g. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas penataan wilayah di 35 Kabupaten/Kota melalui penataan batas dengan ditetapkannya 72 segmen batas daerah dan meraih penghargaan Terbaik I Fasilitator Penegasan Batas Daerah Tingkat Nasional Tahun 2014, penataan kode data administrasi wilayah, serta tersusunnya basis data rupabumi Jawa Tengah yang telah dimuat dalam Gazetir Nasional dan diakui secara internasional dengan bertambahnya 38 pulau di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah.
- h. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Tengah.
- i. Peningkatan tertib administrasi pelaksanaan tugas pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- j. Peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan diraihnya Parasamya Purnakarya Nugraha pada tahun 2014 dan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha pada tahun 2015, 2016 dan 2018 untuk evaluasi dan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.
- k. Peningkatan kualitas Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Jawa Tengah Periode 2013 – 2018.

Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam dan luar negeri. Dalam kurun waktu tahun 2014-2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah

menandatangani 443 naskah kerja sama dengan lembaga pemerintah dalam negeri dan 148 naskah kerja sama dengan pihak ketiga dalam negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama *sister province* dengan 4 provinsi di luar negeri, yaitu Negara Bagian *Queensland* Australia, Provinsi Fujian China, Chung Cheong Buk Do Korea dan Siem Reap Kamboja. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama dengan 8 lembaga non pemerintah luar negeri (*International Non Governmental Organization*) yaitu *Vredeseilanden-Coopibo Non-Profit Association (VECO)* Swedia dengan program pemberdayaan masyarakat desa, *Interchurch Organization For Development Cooperation (ICCO)* Belanda dengan program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa, *PLAN International Incorporation (PLAN)* Spanyol dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat, *Arbeiter Samariter Bund (ASB)* Jerman dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan, *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)* Belanda dengan program pembangunan wilayah terpadu yang berkelanjutan, *Swiss Contact (SC)* Swiss dengan program pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, *Konrad Adeneur Stiftung (KAS)* Belanda dengan program pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, *The Organization For Industrial, Spiritual And Cultural Advancement International (OISCA)* Jepang dengan program pemberdayaan masyarakat desa.

2.3.b. Capaian Kinerja Biro Hukum

Capaian kinerja Biro Hukum, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas rancangan produk hukum Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peningkatan kualitas kajian atas produk hukum Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peningkatan fasilitasi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Peningkatan pemberian bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang terikat kerja sama dalam fasilitasi penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan.
- e. Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa hukum terutama permasalahan sengketa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- f. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan dalam kegiatan Aksi HAM Kabupaten/Kota dan kegiatan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- g. Peningkatan koordinasi dan penyusunan laporan Aksi HAM serta Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah.

- h. Peningkatan pelayanan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat serta *update*.
- i. Peningkatan sosialisasi produk hukum bagi ASN dan masyarakat di Jawa Tengah.
- j. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui evaluasi dan fasilitasi.

2.3.c. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas pelaksanaan kebijakan pada seluruh Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan Perda Kesejahteraan Lansia dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2011 – 2018.
- c. Penyusunan rekomendasi/kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan penempatan TKI asal Jawa Tengah pada sektor penatalaksana rumah tangga.
- d. Peningkatan upaya pembinaan keagamaan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru pendidikan tingkat dasar dan menengah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- e. Peningkatan koordinasi pembinaan bidang kebudayaan dan kesenian di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- f. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pendidikan.
- g. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olah raga.

2.3.d. Capaian Kinerja Biro Perekonomian

Capaian kinerja Biro Perekonomian, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi BUMD, sosialisasi program PKBL-BUMN, KUR, KKPE, KUPS, Lembaga Keuangan Mikro, dan permodalan bagi UMKM di Jawa Tengah.
- b. Peningkatan pembinaan, monev BUMD, MP3I, promosi bidang penanaman modal dan UKM bidang pariwisata serta promosi produk unggulan.
- c. Peningkatan pengumpulan informasi IHT Cukai ilegal dan sosialisasi ketentuan bidang cukai.
- d. Peningkatan pelaksanaan Rakor BUMD, Ekuinda, Kerajinan Daerah, dan Pemantauan Komoditas Strategis TPID, serta Koordinasi bidang Perekonomian.

- e. Peningkatan pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal Tahun berjalan dan Tahun Baru Berikutnya.
- f. Peningkatan pelaksanaan RUPS dan kajian BUMD.

2.3.e. Capaian Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam:

Capaian kinerja Biro Bina Produksi, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang perikanan dan kelautan.
- c. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang kehutanan.
- d. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup.
- e. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral.

2.3.f. Capaian Kinerja Biro Organisasi

Capaian kinerja Biro Organisasi, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah di 35 pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, selama lima tahun.
- c. Penataan kelembagaan non struktural Provinsi di Jawa Tengah.
- d. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Formasi PNS pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan penyusunan formasi PNS di 35 pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- f. Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Provinsi Jawa Tengah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja (PK) Gubernur Jawa Tengah dan Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan RKT SKPD Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun.
- g. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan IKU SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.
- h. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan Sistem AKIP di 35 pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

- i. Peningkatan pengembangan budaya kerja aparatur di SKPD Provinsi Jawa Tengah dan terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan budaya kerja di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- j. Penyusunan Draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan terfasilitasinya penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- k. Penyusunan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyusunan tata naskah dinas di 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- l. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyusunan SOP di 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- m. Penyusunan Pola Hubungan Kerja di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyusunan pola hubungan kerja di Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- n. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Unit Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyusunan SPP di Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- o. Pendampingan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi Jawa Tengah.
- p. Sertifikasi ISO pada Unit Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah.
- q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah.
- r. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.

2.3.g. Capaian Kinerja Biro Umum

Capaian kinerja Biro Umum, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan rumah tangga pimpinan.
- b. Peningkatan penyelenggaraan ketatausahaan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Peningkatan kualitas penyusunan analisis dan kebutuhan barang di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Setda Prov. Jawa Tengah.
- e. Peningkatan pelayanan acara protokoler dan pelayanan tamu daerah.
- f. Peningkatan pelayanan bidang kehumasan dan publikasi pimpinan daerah.

2.3.h. Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah:

Capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jateng pada 48 OPD maupun bantuan keuangan kepada 35 Kabupaten/Kota.
- b. Peningkatan pengendalian pelaksanaan bantuan keuangan kepada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c. Peningkatan kualitas pelaporan kegiatan pada OPD dan Kabupaten/Kota.
- d. Peningkatan kualitas LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2013-2018.
- e. Peningkatan pelayanan Pengadaan barang dan jasa pada 48 OPD, dengan terbentuknya Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional. Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

2.4.1. Tantangan Bagi Pengembangan Pelayanan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.4.1.a. Tantangan Pengembangan Pelayanan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang semakin berkualitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan sebagai simpul pelayanan publik di daerah, sehingga menuntut peningkatan kapasitas Pemerintahan.
- 2) Meningkatnya konflik pertanahan sehingga menuntut adanya kebijakan dan penyelesaian yang tepat dan komprehensif.
- 3) Masih adanya konflik batas daerah dan permasalahan di wilayah perbatasan, sehingga memerlukan adanya penataan wilayah sesuai dengan kebutuhan lokal.
- 4) Semakin meningkatnya kompetisi antar daerah yang menuntut adanya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 5) Masih terjadinya konflik pemilihan kepala daerah sehingga menuntut adanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

- 6) Semakin terbatasnya sumber daya daerah sehingga menuntut peningkatan kerja sama daerah.

2.4.1.b. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Hukum

- 1) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap adanya *law enforcerment*.
- 2) Meningkatnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari unsur KKN.
- 3) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan HAM.
- 4) Tuntutan terhadap pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, mudah dan akurat serta *update*.
- 5) Meningkatnya permasalahan hukum dari masyarakat tidak mampu yang sedang ber perkara di lembaga peradilan.
- 6) Tuntutan proses pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas, efektif dan cepat.

2.4.1.c. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat

- 1) Masih banyaknya penduduk miskin di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi antar stakeholder yang terkait.
- 2) Masih tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan lintas sektoral secara tepat.
- 3) Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja utamanya pada akses layanan kesehatan dan kepemilikan rumah layak huni dan belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
- 4) Belum optimalnya upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dikarenakan permasalahan belum terpenuhinya sarana prasarana serta meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan.
- 5) Meningkatnya kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iur (PBI) yang ditanggung oleh Pemerintah.
- 6) Diterbitkannya regulasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai upaya tindak lanjut masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat untuk menekan munculnya penyakit-penyakit tidak menular yang membutuhkan biaya besar dalam pengobatannya, seperti kanker, Jantung, hipertensi, DM.
- 7) Semakin meningkatnya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak, sehingga membutuhkan perhatian untuk pengambilan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi.

- 8) Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan penanganan secara tepat dan terkoordinir agar menghasilkan kinerja yang optimal.
- 9) Meningkatnya tuntutan akan kerukunan umat beragama di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan upaya koordinasi dan fasilitasi agar terwujudnya kerukunan umat beragama.
- 10) Menurunnya minat masyarakat dan generasi muda terhadap nilai-nilai budaya asli daerah, sehingga membutuhkan upaya peningkatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang seni dan budaya.
- 11) Meningkatnya ekstensi masyarakat Jawa Tengah terhadap peran pemuda dalam mengisi pembangunan di Jawa Tengah.
- 12) Meningkatnya eksistensi masyarakat Jawa Tengah terhadap prestasi bidang Olah raga di tingkat nasional maupun internasional.
- 13) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perbaikan sarana prasarana ibadah, tempat pendidikan agama.
- 14) Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas fasilitasi kegiatan kebudayaan kesenian dan Olah raga.

2.4.1.d. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian

- 1) Terbatasnya kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank, Non Koperasi dan UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun melakukan persiapan menuju berbadan hukum.
- 2) Lemahnya akses kepada lembaga permodalan dan promosi pemasaran serta manajemen usaha yang masih sederhana.
- 3) Meningkatnya jumlah pemudik ke Jawa Tengah dan adanya ruas jalan tol yang mengakibatkan bertambah nya pemudik menggunakan moda pribadi.
- 4) Lemahnya daya dukung sarana dan prasarana jalan alternatif masih kurang mendukung dalam angkutan lebaran.
- 5) Keterbatasan kewenangan Provinsi di bidang Perkeretaapian terkait reaktivasi Jalur Kereta Api.
- 6) Keterbatasan kewenangan Provinsi di bidang Udara terkait pengembangan Bandara di Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Jalur reaktivasi yang sudah beralih fungsi dan Pengadaan lahan.
- 8) Kurangnya sinergi program pengembangan pariwisata antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta stakeholder di bidang pariwisata.

2.4.1.e. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

- 1) Tuntutan adanya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penyusunan kebijakan bidang

infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.

- 2) Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energy sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.
- 3) Adanya tuntutan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energy sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.
- 4) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan, sehingga diperlukan peningkatan kinerja bidang pertanian melalui peningkatan produksi dan keanekaragaman pangan.
- 5) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan energi, sehingga dibutuhkan peningkatan penghematan dan pengelolaan energi baru terbarukan.

2.4.1.f. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

2.4.1.g. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi

- 1) Adanya tuntutan internasional untuk menerapkan *good governance* dan *clean government*.
- 2) Semakin meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- 3) Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat.
- 4) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

2.4.1.h. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Umum

- 1) Adanya tuntutan pelayanan bidang kerumahtanggaan dan keuangan setda yang optimal.
- 2) Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai.
- 3) Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang keprotokolan dan kehumasan.

2.4.1.i. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

- 2) Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- 3) Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Setda.
- 4) Masih terdapat kegiatan Bantuan Keuangan kepada kab/kota yang pelaksanaannya terlambat maupun tidak dapat dilaksanakan/tidak selesai.

2.4.2. Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.4.2.a. Peluang Pengembangan Pelayanan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama

- 1) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- 2) Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.4.2.b. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memiliki produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan lainnya, kepentingan umum, efektif dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- 2) Kondisi dan situasi wilayah Jawa Tengah yang relatif stabil dan kondusif.
- 3) Tertib administrasi dalam penyusunan dan pembentukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta dalam perlindungan hukum atas pengamanan barang milik daerah/aset.
- 4) Optimalisasi/pengembangan dan peningkatan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang sedang berperkara di lembaga peradilan.
- 5) Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan kewenangannya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 6) Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi yang kompeten, baik internal SKPD maupun eksternal SKPD pengampu kewenangan yaitu Kabupaten/Kota dan pusat guna membentuk layanan dalam sistem JDIH yang terpadu.

2.4.2.c. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Sosial

- 1) Pentingnya komitmen pemerintah dalam peningkatan SDM dilingkup biro karena tugas dan fungsi yang bermacam disiplin ilmu.
- 2) Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan agama di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Beragamnya budaya daerah yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Banyaknya ormas/lembaga/perkumpulan bidang kesenian, pemuda dan Olah raga yang ada di Jawa Tengah.
- 5) Tersedianya sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah, sesuai Undang-undang No. 23 kewenangan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah sehingga ditinjau dari sarana, prasarana penunjang dan SDM perlu dipikirkan dalam proses belajar mengajar .
- 6) Kesehatan dalam kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi dimana upaya-upaya untuk menekan kasusnya masih terus dilakukan, diantaranya dengan istilah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Jateng gayeng nginceng wong meteng, diharapkan dapat menekan kasus AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi).
- 7) Persebaran tenaga medis dan non medis yang kurang merata dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani.
- 8) Sekolah-sekolah intuisi bagi penyandang disabilitas perlu dipikirkan sarana prasarana dan SDM pengajarnya, dimana perlu peran Pemerintah dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan kecerdasan mereka untuk ikut berperan serta dalam pembangunan
- 9) Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) belum optimal karena jumlah PMKS yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan serta kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri.
- 10) Penanganan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terus dilakukan untuk Basic Data Terpadu bagi masyarakat Penerima Bantuan Iur yang ditanggung Pemerintah dalam jaminan kesehatan nasional.
- 11) Penanggulangan bencana yang difokuskan pada upaya pengurangan resiko dan kerentanan bencana.
- 12) Belum optimalnya peluang bagi kegiatan produktif, lemahnya kemampuan SDM terutama pada kelompok muda dan anak dari keluarga miskin.

2.4.2.d. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian

- 1) Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan kemampuan SDM, Lembaga Keuangan Mikro, dan modal usaha.
- 2) Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi guna mensinergikan kegiatan di Provinsi dengan kab/kota.

- 3) Adanya komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan berusaha dan bekerja, jumlah usaha kecil menengah serta menarik investor.
- 4) Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mendorong kepada perusahaan daerah selalu meningkatkan pendapatannya.
- 5) Kompetitifnya pelaku usaha pada kegiatan – kegiatan yang dikelola oleh BUMD.
- 6) Adanya komitmen Pemerintah dalam mewujudkan angkutan aglomerasi Trans Jateng.
- 7) Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi bersama stake holder terkait dalam pengembangan bandara di Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Reaktivasi Jalur Kereta Api.

2.4.2.e. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Pelayanan Pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan akuntabel dilakukan oleh suatu lembaga secara mandiri.
- 2) Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

2.4.2.f. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

- 1) Adanya kebijakan dan komitmen Gubernur untuk mewujudkan Jawa Tengah dapat berdikari di bidang pangan dan energi.
- 2) Tersedianya lahan pertanian yang potensial dan produktif untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah berdikari di bidang pangan.
- 3) Adanya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 4) Adanya tuntutan global untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis system informasi yang handal.

2.4.2.g. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi

- 1) Adanya kebijakan dan komitmen Gubernur untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih dan jujur.
- 2) Adanya tuntutan global untuk mewujudkan adanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di semua lini Pemerintahan.

2.4.2.h. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Umum

- 1) Tercapainya kondisi sarana dan prasarana gedung kantor Gubernur yang memadai.

- 2) Tercapainya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang cepat, lancar dan bertanggungjawab.

2.4.2.i. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi pembangunan Daerah

- 1) Komitmen dari pimpinan OPD dan Bupati/Walikota dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara efektif.
- 2) Tersedianya teknologi Informasi yang memadai dalam mendukung pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang optimal. Pelayanan Sekretariat Daerah 2013 – 2018 berada pada lingkup tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Lingkup tugas pelayanan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, seperti:

- 1). Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
- 2). Program Pemerintahan Umum yang digunakan pada renstra periode sebelumnya (2013-2018) dirasa belum mampu merepresentasikan tugas Sekretariat Daerah secara optimal,
- 3). Belum optimalnya input rekomendasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah oleh Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah,
- 4). Belum optimalnya input informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif oleh Biro Lingkup Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur),
- 5). Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
- 6). Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal,
- 7). Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah,
- 8). Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, dan
- 9). Belum optimalnya koordinasi pembangunan antar sektor dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah.

Berangkat dari berbagai permasalahan umum pelayanan Sekretariat Daerah di atas selanjutnya diperumuskan lingkup masalah pokok, masalah isu kebijakan, dan akar masalah yang selanjutnya disajikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyusunan kebijakan belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis data/bukti yang handal.	<p>(1). Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung berbagai alternatif kebijakan yang inovatif.</p> <p>(2). Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung oleh agenda penataan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1). Kebutuhan penyediaan dan tuntutan kualitas telaah berbagai alternatif kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis.</p> <p>(2). Sinergi penataan peraturan perundang-undangan guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>
2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal mendorong terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemeritahan daerah.	<p>(1). Manajemen pengelolaan kebijakan strategis belum optimal sehingga perlu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Daerah,</p> <p>(2). Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.</p> <p>(3). Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi berbagai lingkup pemerintahan daerah.</p> <p>(4). Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal mendorong efektifitas kerja sama berbagai lingkup pemerintahan daerah.</p>	<p>(1). Belum optimalnya manajemen pelaksanaan program/kegiatan strategis sehingga pencapaiannya cenderung belum efektif dan akuntabel.</p> <p>(2). Belum optimalnya manajemen pengendalian pencapaian kinerja perangkat daerah,</p> <p>(3). Koordinasi antar lingkup pemerintahan daerah belum optimal memfasilitasi kebutuhan bersama berbagai pihak,</p> <p>(4). Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal mendorong inovasi penyelenggaraan pemerintahan secara relatif merata pada berbagai lingkup pemerintahan daerah.</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 mempunyai visi yaitu: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Visi ini dijabarkan dalam empat misi, yaitu:

- 1). Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI,
- 2). Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota,
- 3). Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- 4). Menjadika rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Atas visi dan keempat misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui tugas dan fungsinya berposisi mendukung pencapaian visi dan seluruh misi yang ada. Adapun secara khusus, peran utama Sekretariat Daerah yang eksistensinya berada dalam upaya meningkatkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka secara khusus dapat juga diartikan mendukung pencapaian misi kedua, yaitu: mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut disajikan tabel 3.2. yang merupakan deskripsi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selanjutnya disandingkan dengan visi, misi, program gubernur dan wakil gubernur, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"			
	Misi 02 : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota	(1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;	(1). Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung berbagai alternatif kebijakan yang inovatif.	
				Faktor Penghambat
				1 Peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset belum optimal
				2 Peran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Pemerintahan belum optimal
				3 Fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri belum optimal
				4 Peran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam belum optimal
				5 Peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Kesejahteraan

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Rakyat belum optimal
				6 Peran Biro Perekonomian dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perekonomian belum optimal
				Faktor Pendorong
				1 Kebutuhan perumusan kebijakan-kebijakan baru (inovasi) sesuai dengan konteks situasi yang dinamis
			(2). Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung oleh agenda penataan peraturan perundang-undangan.	
				Faktor Penghambat
				1 Sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum belum optimal
				Faktor Pendorong
		(2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;	(1). Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.	
				Faktor Penghambat
				1 Fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam belum optimal

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				2 Fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Umum belum optimal
				3 Fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat belum optimal
				4 Fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian belum optimal
				5 Pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran belum optimal
				Faktor Pendorong
				1 Adanya Tugas dan Fungsi Sekda (Biro-biro) dalam pengoordinasian pelaksanaan fungsi seluruh perangkat daerah
				2. Urgensi pengendalian pencapaian kinerja sasaran OP dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah
		(3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;	(1). Manajemen pengelolaan kebijakan strategis belum optimal sehingga perlu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Daerah,	
				Faktor Penghambat
				1 Integrasi pengendalian kinerja APBD dengan pencapaian indikator kegiatan dan indikator program perlu ditingkatkan
				2 Fungsi monitoring dan evaluasi pencapaian target pembangunan

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				dengan sumber dana bantuan keuangan perlu ditingkatkan
				3 Akuntabilitas pelaporan kinerja APBD dan bantuan keuangan melalui penyempurnaan sistem informasi pelaporan APBD dan bantuan keuangan perlu ditingkatkan
				4 Peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam pembinaan penyusunan LKPJ Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan
				5 Sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota belum optimal
				6 Aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIIH perlu ditingkatkan
				7 Pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum perlu ditingkatkan
				8 Pedampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM belum optimal
				9 Fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan belum optimal
				10 Pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota belum optimal
				11 Pendampingan dalam rangka pelaksanaan ANJAB pada Perangkat Daerah Provinsi dan

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Kabupaten/kota belum optimal
				12 Pembinaan dan evaluasi implementasi standar pelayanan publik perlu ditingkatkan
				13 Fungsi pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah belum optimal
				14 Pembinaan implementasi Sistem AKIP dan ZI pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan
				15 Fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan
				16 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam perlu ditingkatkan
				17 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan
				18 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang Perekonomian perlu ditingkatkan
				19 Tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa belum optimal
				20 Pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa belum optimal
				21 Kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa perlu

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				ditingkatkan
				Faktor Pendorong
				1 Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan perlu dibangun sampai pada aspek pencapaian, efisiensi, dan efektifitas program/kegiatan pembangunan.
		(4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;	(1). Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi berbagai lingkup pemerintahan daerah.	
				Faktor Penghambat
				1 Fungsi pembinaan melalui pendampingan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota perlu ditingkatkan
				Faktor Pendorong
				1 Kebutuhan untuk melakukan sinergi dan integrasi berbagai pelaksanaan program/kegiatan untuk menghasilkan efek pembangunan yang luas dan merata.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan dengan Renstra seluruh Perangkat Daerah Provinsi karena Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selain sebagai pengoordinasi pelaksanaan fungsi seluruh perangkat daerah, secara umum Setda memiliki peran untuk mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut gambaran hubungan relasional pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda terkait dengan pencapaian renstra seluruh OPD berikut dengan permasalahan, kondisi yang menghambat, dan mendorong pelaksanaan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Tabel 3.3.
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Renstra seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	(1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;	(1). Penyusunan kebijakan belum berdasarkan suatu telaah atas data/informasi yang kuat.	Faktor Penghambat: Ketersediaan data/informasi pendukung dan penguasaan analisis kebijakan Faktor Pendorong: Kebutuhan perumusan kebijakan-kebijakan baru (inovasi) sesuai dengan konteks situasi yang dinamis
		(2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;	(2). Koordinasi Pencapaian IKU seluruh OPD belum optimal	Faktor Penghambat: Kualitas indikator dan kapasitas OPD dalam mendorong pencapaian target tujuan/sasaran kinerja yang ditetapkan Faktor Pendorong: Adanya Tugas dan Fungsi Sekda (Biro-biro) dalam pengoordinasian pelaksanaan fungsi

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				seluruh perangkat daerah
		(3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;	(3). Pengendalian atas pencapaian seluruh target pembangunan belum dilaksanakan secara optimal.	Faktor Penghambat: Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kebijakan dan kualitas tolok ukur keberhasilan kebijakan. Faktor Pendorong: Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan perlu dibangun sampai pada aspek pencapaian, efisiensi, dan efektifitas program/kegiatan pembangunan.
		(4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur.	(4). Koordinasi antar lingkup pemerintahan daerah belum optimal memfasilitasi kebutuhan bersama berbagai pihak	Faktor Penghambat: Sulitnya menyamakan konsepsi dan komitmen antar berbagai lingkup pemerintahan daerah. Faktor Pendorong: Kebutuhan untuk melakukan sinergi dan integrasi berbagai pelaksanaan program/kegiatan untuk menghasilkan efek pembangunan yang luas dan merata.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak terkait secara langsung dengan RTRW dan KLHS pada RPJMD.

TABEL 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW			
	Program Indikatif			
II	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis			
	Skenario dan Rekomendasi			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, dan peningkatan manajemen umum di lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu terdapat isu-isu strategis yang perlu didorong dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Berikut isu-isu strategis pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1). Perumusan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah secara utuh dan komprehensif mendasarkan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan PP nomor 18 Tahun 2016,
- 2). Revitalisasi Peran Sekretariat Daerah dalam manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- 3). Perumusan pola hubungan kerja/sistem tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah
- 4). Peningkatan sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan dari level Kabupaten/kota hingga Pemerintah Pusat,
- 5). Peningkatan kapasitas SDM Biro lingkup Sekretariat Daerah utamanya terkait pemahaman tugas dan fungsi sekretariat daerah, dan
- 6). Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, yaitu:

”Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”.

4.2. Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah,
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 merumuskan sejumlah program, yaitu:

Sasaran Pertama, Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah akan diwujudkan melalui dua program, yaitu: Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Sasaran Kedua, Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan diwujudkan melalui empat program, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah, Program Adminstrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sasaran Ketiga, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah akan diwujudkan melalui tiga program, yaitu: Program Pelayanan Umum, Keprotokolan dan Kehumasan; Program Manajemen, Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah; dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	0	0	80	81	82	83	84	84
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	0	0	80	81	82	83	84	84
		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	0	0	75	76	77	78	79	80
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	0	0	85	85	85	85	85	85
		Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	0	0	85	85	85	85	85	85
		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	0	0	70	75	80	85	90	90
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	0	0	85	85	85	85	85	85
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	0	0	80	85	90	93	96	96
		Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	0	0	90	91	92	93	94	94
		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	0	0	81	87	92	93	94	94
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	0	0	80	82	83	84	85	85

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	0	0	80	82	83	84	85	85
		Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	0	0	80	81	82	83	84	84
		Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	0	0	90	91	92	93	94	94
		peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	0	0	90	91	92	93	94	94
		Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	0	0	90	91	92	93	94	94
		Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	0	0	19	22	25	28	31	31
		presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	0	0	52,1	64,32	76,48	88,64	100	100
		Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	70	73	73	78	82	87	92	92
		Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	11	11,4	25	40	54	70	85	85
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	0	0	80	84	88	92	96	96
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	0	0	85	85	85	85	85	85
		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	0	0	85	89	90	93	95	95
		Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	0	0	60	63	65	67	70	70
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	0	0	85	85	85	85	85	85

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017/2018)		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	0	0	80	84	88	92	96	96
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	100	100	100	100	100	100
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	0	0	85	85	85	85	85	85
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	0	0	100	100	100	100	100	100
		Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	0	0	100	100	100	100	100	100
		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	0	0	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	0	0	75	76	77	78	79	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Dan, arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

5.1. Strategi Setda Provinsi Jawa Tengah

Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- 1). Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset,
- 2). Peningkatan peran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Pemerintahan,
- 3). Peningkatan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri,
- 4). Peningkatan peran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 5). Peningkatan peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat,
- 6). Peningkatan peran Biro Perekonomian dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perekonomian,
- 7). Optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum,
- 8). Integrasi pengendalian kinerja APBD dengan pencapaian indikator kegiatan dan indikator program,
- 9). Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pencapaian target pembangunan dengan sumber dana bantuan keuangan,
- 10). Peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja APBD dan bantuan keuangan melalui penyempurnaan sistem informasi pelaporan APBD dan bantuan keuangan,

- 11). Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam pembinaan penyusunan LKPJ Kabupaten/Kota,
- 12). Optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota,
- 13). Peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIIH,
- 14). Peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum,
- 15). Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM,
- 16). Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan,
- 17). Optimalisasi pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota,
- 18). Optimalisasi pendampingan dalam rangka pelaksanaan ANJAB pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota,
- 19). Peningkatan pembinaan dan evaluasi implementasi standar pelayanan publik,
- 20). Optimalisasi fungsi pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah,
- 21). Peningkatan pembinaan implementasi Sistem AKIP dan ZI pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
- 22). Peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,
- 23). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 24). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat
- 25). Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang Perekonomian,
- 26). Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa
- 27). Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa
- 28). Peningkatan kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa

- 29). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset,
- 30). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam,
- 31). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Umum,
- 32). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat
- 33). Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian
- 34). Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran,
- 35). Peningkatan fungsi pembinaan melalui pendampingan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota, dan
- 36). Peningkatan kualitas pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan.

5.2. Arah Kebijakan Setda Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut:

- 1). Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah,
- 2). Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah,
- 3). Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah,
- 4). Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan
- 5). Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah			1) Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah, 2) Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah, 3) Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah, 4) Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan 5) Peningkatan sinergi dan efektivitas pembangunan daerah.
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	
		Peningkatan peran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Pemerintahan	
		Peningkatan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan peran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
		Peningkatan peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat	
		Peningkatan peran Biro Perekonomian dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perekonomian	
		Optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum	
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Integrasi pengendalian kinerja APBD dengan pencapaian indikator kegiatan dan indikator program	
		Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pencapaian target pembangunan dengan sumber dana bantuan keuangan	
		Peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja APBD dan bantuan keuangan melalui penyempurnaan sistem informasi pelaporan APBD dan bantuan keuangan	
		Peningkatan peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam pembinaan penyusunan LKPJ Kabupaten/Kota	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota	
		Peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH	
		Peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum	
		Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM	
		Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan	
		Optimalisasi pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota	
		Optimalisasi pendampingan dalam rangka pelaksanaan ANJAB pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota	
		Peningkatan pembinaan dan evaluasi implementasi standar pelayanan publik	
		Optimalisasi fungsi pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah	
		Peningkatan pembinaan implementasi Sistem AKIP dan ZI pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
		Peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
		Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat	
		Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang Perekonomian	
		Optimalisasi tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa	
		Optimalisasi pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa	
		Peningkatan kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Umum	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat	
		Optimalisasi fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran	
		peningkatan fungsi pembinaan melalui pendampingan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab V, maka diperlukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahun 2018 – 2023.

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 secara rinci tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah				Persentase Kebijakan yang Efektif	%	0	0	80		81		82		83		84		84			
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	0	0	80		81		82		83		84		84			
				Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	0	0	75		76		77		78		79		80			
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah			Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	0	0	85		85		85		85		85		85			
				Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	0	0	85		85		85		85		85		85			
				Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	0	0	70		75		80		85		90		90			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	0	0	85		85		85		85		85		85			
				Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	0	0	80		85		90		93		96		96			
				Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	0	0	90		91		92		93		94		94			
				Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	0	0	81		87		92		93		94		94			
		4.01.15	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						7.071.088		7.701.250		8.428.000		9.495.000		10.678.000		43.373.338		
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	0	0	85		100		100		100		100		100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
				Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	%	0	0	85		85		85		85		85		85		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	100	90	80		85		90		93		96		96		Biro Perekonomian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	100	90	83		85		88		90		93		93		Biro Perekonomian Daerah	
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	100	90	80		80		80		80		80		80		Biro Perekonomian Daerah	
		4.06.15.001	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan						100.000		100.000		100.000		175.000		208.000		683.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			an dan Aset																		
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	Dokumen	0	1	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	175.000	1	208.000	5	683.000		
		4.06.15.002	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan						250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		1.250.000	SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	10	1.250.000		
		4.06.15.003	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM						500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		2.500.000	SUB BAGIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	0	0	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000	20	2.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.06.15.004	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan						600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		3.000.000	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG KEUANGAN	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	Dokumen	0	0	5	600.000	5	600.000	5	600.000	5	600.000	5	600.000	25	3.000.000		
		4.06.15.005	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi						320.000		320.000		320.000		320.000		320.000		1.600.000	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	0	0	3	320.000	3	320.000	3	320.000	3	320.000	3	320.000	15	1.600.000		
		4.06.15.006	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan						168.000		168.000		168.000		185.000		250.000		939.000	SUB BAGIAN PERHUBUNGAN	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	Dokumen	0	0	3	168.000	3	168.000	3	168.000	3	185.000	3	250.000	15	939.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.06.15.007	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata						220.000		220.000		220.000		220.000		275.000		1.155.000	SUB BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	0	0	2	220.000	2	220.000	2	220.000	2	220.000	2	275.000	10	1.155.000		
		4.06.15.008	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan						50.000		100.000		150.000		200.000		300.000		800.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PERPUSTAKAAN	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	0	0	1	50.000	1	100.000	1	150.000	1	200.000	1	300.000	5	800.000		
		4.06.15.009	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						50.000		100.000		150.000		200.000		250.000		750.000	SUB BAGIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	0	0	1	50.000	1	100.000	1	150.000	1	200.000	1	250.000	5	750.000		
		4.06.15.010	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan						125.000		125.000		150.000		200.000		250.000		850.000	SUB BAGIAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	Dokumen	0	0	2	125.000	2	125.000	2	150.000	2	200.000	2	250.000	10	850.000		
		4.06.15.011	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan						50.000		100.000		150.000		200.000		300.000		800.000	SUB BAGIAN KESEHATAN	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	Dokumen	0	0	1	50.000	1	100.000	1	150.000	1	200.000	1	300.000	5	800.000		
		4.06.15.012	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						50.000		100.000		150.000		200.000		300.000		800.000	SUB BAGIAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	0	0	1	50.000	1	100.000	1	150.000	1	200.000	1	300.000	5	800.000		
		4.06.15.013	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.						50.000		100.000		150.000		200.000		250.000		750.000	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0	0	1	50.000	1	100.000	1	150.000	1	200.000	1	250.000	5	750.000		
		4.06.15.014	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberda						50.000		100.000		150.000		200.000		250.000		750.000	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			yaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil																	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Dokumen		0	0	1	50.000	1	100.000	1	150.000	1	200.000	1	250.000	5	750.000		
		4.06.15.016	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang						400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		2.000.000	SUB BAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
			Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen		0	0	3	400.000	3	400.000	3	400.000	3	400.000	3	400.000	15	2.000.000		
		4.06.15.017	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		2.000.000	SUB BAGIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			an																		
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0	0	3	400.000	3	400.000	3	400.000	3	400.000	3	400.000	15	2.000.000		
		4.06.15.018	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan						200.000		200.000		200.000		225.000		275.000		1.100.000	SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	0	0	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	225.000	2	275.000	10	1.100.000		
		4.06.15.019	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral						200.000		200.000		200.000		225.000		275.000		1.100.000	SUB BAGIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	0	0	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	225.000	2	275.000	10	1.100.000		
		4.06.15.020	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan						100.000		100.000		150.000		200.000		250.000		800.000	SUB BAGIAN KETAHANAN PANGAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	0	0	1	100.000	2	100.000	2	150.000	2	200.000	2	250.000	9	800.000		
		4.06.15.021	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan						100.000		100.000		150.000		200.000		250.000		800.000	SUB BAGIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	Dokumen	0	0	2	100.000	2	100.000	2	150.000	2	200.000	2	250.000	10	800.000		
		4.06.15.022	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan						200.000		200.000		200.000		225.000		275.000		1.100.000	SUB BAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Dokumen	0	0	3	200.000	2	200.000	3	200.000	2	225.000	3	275.000	13	1.100.000		
		4.06.15.023	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan						150.000		150.000		150.000		200.000		250.000		900.000	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
				Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	Dokumen	0	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	200.000	1	250.000	5	900.000		
		4.06.15.024	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri						1.420.088		1.590.250		1.692.000		1.892.000		2.000.000		8.594.338	SUB BAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
				Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam	Dokumen	0	0	1	504.131	1	590.250	1	600.000	1	700.000	1	710.000	5	3.104.381		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				negeri																	
				Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	Dokumen	93	132	50	915.957	50	1.000.000	50	1.092.000	50	1.192.000	50	1.290.000	250	5.489.957		
		4.06.15.025	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri						1.318.000		1.478.000		1.678.000		1.878.000		2.000.000		8.352.000	SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
				Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	Dokumen	0	0	1	896.240	1	1.000.000	1	1.078.000	1	1.178.000	1	1.260.000	5	5.412.240		
				Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	%	0	0	100	421.760	100	478.000	100	600.000	100	700.000	100	740.000	100	2.939.760		
		4.01.16	Penataan Peraturan Perundang-Undangan						1.980.000		2.216.000		2.316.000		2.416.000		2.516.000		11.444.000		
				Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai	%	0	0	90		91		92		93		94		94		Biro Hukum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				kaidah pembentukan perundang-undangan																	
				Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	0	0	90		91		92		93		94		94		Biro Hukum	
		4.06.16.026	Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah						1.386.000		1.566.000		1.621.200		1.691.200		1.761.200		8.025.600	SUB BAGIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Biro Hukum; Biro Hukum
				Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	15	15	15	831.600	15	783.000	16	810.600	16	845.600	17	880.600	75	4.151.400		
				Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Dokumen	0	0	100	554.400	110	783.000	120	810.600	130	845.600	140	880.600	600	3.874.200		
		4.06.16.027	Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah						594.000		650.000		694.800		724.800		754.800		3.418.400	SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM	Biro Hukum; Biro Hukum
				Jumlah produk hukum yang dikaji	Dokumen	8	8	12	356.400	13	325.000	14	347.400	15	362.400	16	377.400	60	1.768.600		
				Jumlah produk hukum yang disosialisasi	Dokumen	0	0	3	237.600	3	325.000	4	347.400	4	362.400	5	377.400	19	1.649.800		
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggar			Efektifitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	0	0	80		82		83		84		85		85			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	aan Pemerintahan Daerah																				
				Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	0	0	80		82		83		84		85		85			
				Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	0	0	80		81		82		83		84		84			
				Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	0	0	90		91		92		93		94		94			
				peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	0	0	90		91		92		93		94		94			
				Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	0	0	90		91		92		93		94		94			
				Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	0	0	19		22		25		28		31		31			
				presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	0	0	52,10		64,32		76,48		88,64		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD																	
		4.01.17	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah						35.249.000		35.573.300		36.482.670		37.884.029		38.705.201		183.894.200		
				Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	0	0	85		87		88		89		90		90		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
				Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	%	0	0	80		82		83		84		85		85		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
				Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%	0	0	87		87		88		88		88		88		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
				Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
				Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
				Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	
				presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	0	0	39		45		51		57		63		63		Biro Organisasi	
				Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	75	80	83		84		85		85		86		86		Biro Organisasi	
				Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	0	0	9,65		22,12		34,59		47,06		59,53		59,53		Biro Organisasi	
				Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	50	50	52,29		67,99		78,59		89,19		100		100		Biro Organisasi	
				Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	60	64	68		74		83		92		100		100		Biro Organisasi	
				Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area	%	14	14	28		42		57		71		85		85		Biro Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat																	
				Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%	0	0	90		91		92		93		94		94		Biro Hukum	
				Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%	0	0	90		91		92		93		94		94		Biro Hukum	
				Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%	0	0	90		91		92		93		94		94		Biro Hukum	
				Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	0	0	90		91		92		93		94		94		Biro Hukum	
				Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	90	85		89		90		93		95		95		Biro Perekonomian Daerah	
				Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	100	88	85		90		92		96		98		98		Biro Perekonomian Daerah	
				Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan	%	0	0	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya																	
				Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	88	87		90		93		95		97		97		Biro Perekonomian Daerah	
				Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	0	0	90		91		92		93		95		95		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	0	0	70		73		76		79		80		80		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	%	0	0	70		73		76		79		80		80		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	0	0	14		23		31		40		48		48		Biro Organisasi	
				Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	70	73	78		82		87		92		97		97		Biro Organisasi	
		4.06.17.001	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah						900.000		1.200.000		1.200.000		1.300.000		1.400.000		6.000.000	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	98,61	86,11	85	300.000	87	400.000	88	400.000	89	400.000	90	400.000	90	1.900.000		
				Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	98,61	86,11	85	300.000	87	400.000	88	400.000	89	400.000	90	500.000	90	2.000.000		
				Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	98,61	86,11	85	300.000	87	400.000	88	400.000	89	500.000	90	500.000	90	2.100.000		
		4.06.17.002	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah						800.000		1.100.000		1.100.000		1.200.000		1.200.000		5.400.000	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
				Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	%	100	86	85	800.000	85	1.100.000	86	1.100.000	86	1.200.000	86	1.200.000	86	5.400.000		
		4.06.17.003	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jawa						8.000.000										8.000.000	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Tengah																		
				Jumlah Dokumen SHB dan ASB	Dokumen	0	0	1	750.000	0		0		0		0		0	750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	%	0	0	100	750.000	0		0		0		0		0	750.000		
				Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	%	0	0	100	375.000	0		0		0		0		0	375.000		
				Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	%	0	0	100	375.000	0		0		0		0		0	375.000		
				Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	0	0	100	900.000	0		0		0		0		0	900.000		
				Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	%	0	0	100	650.000	0		0		0		0		0	650.000		
				Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	%	0	0	100	950.000	0		0		0		0		0	950.000		
				Persentase Fasilitasi Pengadaan	%	80	100	100	3.250.000	0		0		0		0		0	3.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Barang/Jasa																	
		4.06.17.004	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah						950.000		1.250.000		1.400.000		1.600.000		1.600.000		6.800.000	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH I	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah
				Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	%	97,4	95	80	475.000	82	625.000	83	700.000	84	800.000	85	800.000	85	3.400.000		
				Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	%	97,4	95	80	475.000	82	625.000	83	700.000	84	800.000	85	800.000	85	3.400.000		
		4.06.17.005	Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota						250.000										250.000	SUB BAGIAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH II	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil II yang ditindaklanjuti	%	85	85	85	125.000	0		0		0		0		0	125.000		
				Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil I yang ditindaklanjuti	%	85	85	85	125.000	0		0		0		0		0	125.000		
		4.06.17.006	Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan						750.000		1.000.000		1.000.000		1.050.000		1.100.000		4.900.000	SUB BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah
				Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	Laporan	12	12	12	375.000	12	500.000	12	500.000	12	525.000	12	550.000	12	2.450.000		
				Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	Laporan	12	12	12	375.000	12	500.000	12	500.000	12	525.000	12	550.000	12	2.450.000		
		4.06.17.007	Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah						1.600.000		1.650.000		1.650.000		1.750.000		1.750.000		8.400.000	SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																					Daerah
				Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	Dokumen	1	1	1	1.500.000	1	1.550.000	1	1.550.000	1	1.650.000	1	1.650.000	5	7.900.000		
				Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	500.000		
		4.06.17.008	Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota						400.000										400.000	SUB BAGIAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
				Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	%	0	72,28	70	400.000	0		0		0		0		70	400.000		
		4.06.17.009	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan						600.000		650.000		700.000		750.000		750.000		3.450.000	SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Biro Perencanaan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan																		
				jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	2	600.000	2	650.000	2	700.000	2	750.000	2	750.000	10	3.450.000		
		4.06.17.010	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT						1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		5.000.000	SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Biro Perencanaan Daerah
				jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	Dokumen	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	10	5.000.000		
		4.06.17.011	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM						500.000		525.000		550.000		600.000		600.000		2.775.000	SUB BAGIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Biro Perencanaan Daerah
				jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	0	0	3	500.000	3	525.000	3	550.000	3	600.000	3	600.000	15	2.775.000		
		4.06.17.012	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan						400.000		600.000		650.000		700.000		700.000		3.050.000	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	Biro Perencanaan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			kebijakan BUMD bidang Keuangan																	BIDANG KEUANGAN	
				jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	Dokumen	0	0	4	400.000	4	600.000	4	650.000	4	700.000	4	700.000	20	3.050.000		
		4.06.17.013	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Jasa dan Produksi						300.000		600.000		650.000		700.000		700.000		2.950.000	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI	Biro Perencanaan Daerah
				jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	0	0	3	300.000	3	600.000	3	650.000	3	700.000	3	700.000	15	2.950.000		
		4.06.17.014	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan						264.000		270.000		280.000		350.000		300.000		1.464.000	SUB BAGIAN PERHUBUNGAN	Biro Perencanaan Daerah
				jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	Dokumen	0	0	2	264.000	2	270.000	2	280.000	2	350.000	2	300.000	10	1.464.000		
		4.06.17.015	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan						180.000		200.000		250.000		300.000		300.000		1.230.000	SUB BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN PARIWISAT	Biro Perencanaan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata																	A	
				jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	0	0	2	180.000	2	200.000	2	250.000	2	300.000	2	300.000	10	1.230.000		
		4.06.17.016	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan						600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		3.000.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PERPUSTAKAAN	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Dokumen	0	0	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	5	3.000.000		
		4.06.17.017	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga						390.000		350.000		350.000		350.000		350.000		1.790.000	SUB BAGIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	0	0	1	390.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	5	1.790.000		
		4.06.17.018	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan						1.450.000		700.000		700.000		700.000		700.000		4.250.000	SUB BAGIAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	Dokumen	0	0	4	1.450.000	4	700.000	4	700.000	4	700.000	4	700.000	20	4.250.000		
		4.06.17.019	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan						700.000		750.000		750.000		775.000		775.000		3.750.000	SUB BAGIAN KESEHATAN	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	Dokumen	0	0	1	700.000	1	750.000	1	750.000	1	775.000	1	775.000	5	3.750.000		
		4.06.17.020	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						700.000		450.000		450.000		450.000		500.000		2.550.000	SUB BAGIAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	0	0	1	700.000	1	450.000	1	450.000	1	450.000	1	500.000	5	2.550.000		
		4.06.17.021	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						475.000		600.000		600.000		600.000		600.000		2.875.000	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0	0	1	475.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000	5	2.875.000		
		4.06.17.022	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan						475.000		700.000		700.000		700.000		700.000		3.275.000	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil	Dokumen		0	0	1	475.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000	5	3.275.000		
		4.06.17.024	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan						275.000		310.000		310.000		320.000		350.000		1.565.000	SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
			jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan		0	0	5	275.000	4	310.000	4	310.000	4	320.000	4	350.000	21	1.565.000		
		4.06.17.025	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan						275.000		290.000		290.000		290.000		300.000		1.445.000	SUB BAGIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral																		Alam
				jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	Laporan	0	0	4	275.000	3	290.000	3	290.000	3	290.000	3	300.000	16	1.445.000		
		4.06.17.026	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan						200.000		220.000		250.000		250.000		300.000		1.220.000	SUB BAGIAN KETAHANAN PANGAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	Laporan	0	0	2	200.000	3	220.000	3	250.000	3	250.000	3	300.000	14	1.220.000		
		4.06.17.027	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan						450.000		300.000		300.000		300.000		350.000		1.700.000	SUB BAGIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	Laporan	0	0	2	450.000	2	300.000	2	300.000	2	300.000	2	350.000	10	1.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.06.17.028	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan						1.600.000		800.000		800.000		800.000		800.000		4.800.000	SUB BAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Laporan	0	0	7	1.600.000	6	800.000	7	800.000	6	800.000	7	800.000	33	4.800.000		
		4.06.17.029	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota						550.000		588.500		588.500		588.500		588.500		2.904.000	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KELEMBAGAAN KABUPATEN/KOTA	Biro Organisasi
				Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	Kabupaten/Kota	35	35	35	550.000	35	588.500	35	588.500	35	588.500	35	588.500	35	2.904.000		
		4.06.17.030	Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan						800.000		850.000		850.000		850.000		850.000		4.200.000	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN PERANGKAT	Biro Organisasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			aan Perangkat Daerah																	DAERAH	
				Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	OPD	48	48	48	800.000	48	850.000	48	850.000	48	850.000	48	850.000	48	4.200.000		
		4.06.17.031	Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan						650.000		695.500		695.500		695.500		700.000		3.436.500	SUB BAGIAN ANALISIS DAN FORMASI JABATAN	Biro Organisasi; Biro Organisasi
				Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	Kabupaten/Kota	35	35	35	200.000	35	347.750	35	347.750	35	347.750	35	350.000	35	1.593.250		
				Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	OPD	48	48	48	450.000	48	347.750	48	347.750	48	347.750	48	350.000	48	1.843.250		
		4.06.17.032	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik						1.300.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000		1.350.000		6.700.000	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK	Biro Organisasi; Biro Organisasi
				jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Kabupaten/Kota	35	35	35	520.000	35	675.000	35	675.000	35	675.000	35	675.000	35	3.220.000		
				Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi	Unit	100	100	100	780.000	100	675.000	100	675.000	100	675.000	100	675.000	100	3.480.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				pelaksanaan standar pelayanan																	
		4.06.17.033	Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan						1.100.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		1.150.000		5.700.000	SUB BAGIAN TATALAKSANA	Biro Organisasi; Biro Organisasi
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Kabupaten/Kota	35	35	35	150.000	35	575.000	35	575.000	35	575.000	35	575.000	35	2.450.000		
				Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Unit	0	0	290	950.000	240	575.000	240	575.000	240	575.000	240	575.000	240	3.250.000		
		4.06.17.034	Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas						1.000.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000		1.070.000		5.280.000	SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA	Biro Organisasi; Biro Organisasi; Biro Organisasi; Biro Organisasi; Biro Organisasi
				Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	Kabupaten/Kota	35	35	35	350.000	35	367.500	35	367.500	35	367.500	35	367.500	35	1.820.000		
				Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan	OPD	48	48	48	350.000	48	367.500	48	367.500	48	367.500	48	367.500	48	1.820.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Sistem AKIP																	
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	Kabupaten/Kota	35	35	35	150.000	35	167.500	35	167.500	35	167.500	35	167.500	35	820.000		
				Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	OPD	48	48	48	150.000	48	167.500	48	167.500	48	167.500	48	167.500	48	820.000		
		4.06.17.035	Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi						332.000		354.200		354.200		383.559		444.701		1.868.660	SUB BAGIAN REFORMASI BIROKRASI	Biro Organisasi
				Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	OPD	48	48	48	332.000	48	354.200	48	354.200	48	383.559	48	444.701	48	1.868.660		
		4.06.17.036	Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota						1.130.000		1.266.000		1.266.000		1.266.000		1.266.000		6.194.000	SUB BAGIAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH WILAYAH I	Biro Hukum; Biro Hukum
				Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	Dokumen	0	0	110	565.000	123	633.000	128	633.000	132	633.000	135	633.000	628	3.097.000		
				Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	Dokumen	0	0	115	565.000	127	633.000	132	633.000	138	633.000	140	633.000	652	3.097.000		
		4.06.17.037	Pengelolaan Jaringan						850.000		850.000		875.000		875.000		875.000		4.325.000	SUB BAGIAN DOKUMENT	Biro Hukum; Biro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah																	ASI DAN INFORMASI HUKUM	Hukum; Biro Hukum
				Jumlah produk hukum yang didokumentasi	Dokumen	0	0	90	350.000	90	350.000	90	350.000	90	350.000	90	350.000	450	1.750.000		
				Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	Dokumen	0	0	60	250.000	65	250.000	70	275.000	75	275.000	80	275.000	350	1.325.000		
				Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	Buku	0	0	150	250.000	150	250.000	150	250.000	150	250.000	150	250.000	750	1.250.000		
		4.06.17.038	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum						1.400.000		1.836.000		1.836.000		1.836.000		1.836.000	8.744.000		SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM	Biro Hukum; Biro Hukum; Biro Hukum
				Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	180	180	180	560.000	190	750.000	200	750.000	220	750.000	240	750.000	900	3.560.000		
				Jumlah penanganan perkara perdata/TUN	Perkara	6	6	8	630.000	9	750.000	9	750.000	10	750.000	10	750.000	40	3.630.000		
				Penanganan sengketa hukum	Sengketa	0	0	4	210.000	5	336.000	6	336.000	7	336.000	8	336.000	20	1.554.000		
		4.06.17.039	Kegiatan Peningkatan Pemenuh						580.000		732.800		758.000		800.000		800.000	3.670.800		SUB BAGIAN SENKETA HUKUM	Biro Hukum; Biro Hukum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			an Aksi HAM dan Aksi PPK																	DAN HAM	
				Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	Laporan	0	0	1	174.000	1	366.400	1	379.000	1	400.000	1	400.000	5	1.719.400		
				Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	Kabupaten/Kota	0	0	35	406.000	35	366.400	35	379.000	35	400.000	35	400.000	35	1.951.400		
		4.06.17.040	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						350.000		350.000		350.000		375.000		375.000		1.800.000	SUB BAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Laporan	0	0	5	350.000	4	350.000	4	350.000	4	375.000	4	375.000	21	1.800.000		
		4.06.17.041	Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						300.000		300.000		300.000		300.000		350.000		1.550.000	SUB BAGIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	0	0	4	300.000	4	300.000	4	300.000	4	300.000	4	350.000	20	1.550.000		
		4.06.17.042	Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan								800.000		850.000		850.000		900.000		3.400.000	SUB BAGIAN PENGKAJIAN DAN STANDARISASI PENGADAA N	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Jumlah Dokumen SHB dan ASB	Dokumen	0	0	0		2	800.000	2	850.000	2	850.000	2	900.000	2	3.400.000		
		4.06.17.043	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa								800.000		800.000		850.000		900.000		3.350.000	SUB BAGIAN PERENCANAAN PENGADAA N BARANG/JASA	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	%	0	0	0		100	800.000	100	800.000	100	850.000	100	900.000	100	3.350.000		
		4.06.17.044	Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik								750.000		800.000		850.000		900.000		3.300.000	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LPSE	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa; Biro Administrasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																					Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	%	0	0	0		100	375.000	100	400.000	100	425.000	100	450.000	100	1.650.000		
				Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	%	0	0	0		100	375.000	100	400.000	100	425.000	100	450.000	100	1.650.000		
		4.06.17.045	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa								1.400.000		1.450.000		1.400.000		1.500.000		5.750.000	SUB BAGIAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa; Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam	%	0	0	0		100	1.000.000	100	1.050.000	100	1.100.000	100	1.100.000	100	4.250.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa																	
				Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	%	0	0	0		71	400.000	72	400.000	73	300.000	74	400.000	74	1.500.000		
		4.06.17.046	Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa								600.000		600.000		700.000		750.000		2.650.000	SUB BAGIAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PENGADAA N BARANG/JASA	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	%	0	0	0		100	600.000	100	600.000	100	700.000	100	750.000	100	2.650.000		
		4.06.17.047	Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa								950.000		1.000.000		1.100.000		1.150.000		4.200.000	SUB BAGIAN ADVOKASI PENGADAA N BARANG/JASA	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	%	0	0	0		100	950.000	100	1.000.000	100	1.100.000	100	1.150.000	100	4.200.000		
		4.06.17.048	Kegiatan implementasi						423.000		465.300		509.470		609.470		625.000		2.632.240	SUB BAGIAN REFORMASI	Biro Organisasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota																	BIROKRASI	
				Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB	Kabupaten/Kota	35	35	35	423.000	35	465.300	35	509.470	35	609.470	35	625.000	35	2.632.240		
		4.06.17.049	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa								2.300.000		2.500.000		2.550.000		2.600.000		9.950.000	SUB BAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	0	0	0		100	2.300.000	100	2.500.000	100	2.550.000	100	2.600.000	100	9.950.000		
		4.01.18	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah						3.653.000		4.060.000		4.985.000		5.495.000		5.995.000		24.188.000		
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
				Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi	%	0	0	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				pelaksanaan fungsinya																	
				Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Umum	
				Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	90	80		83		85		89		90		90		Biro Perekonomian Daerah	
				Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	100	90	80		82		85		88		90		90		Biro Perekonomian Daerah	
				Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber	%	0	0	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya																	
				Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
				Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	92	82		85		87		90		92		92		Biro Perekonomian Daerah	
		4.06.18.001	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksana						150.000		150.000		200.000		200.000		200.000		900.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	Biro Administrasi Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			an Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran																		Daerah
				Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	Laporan	0	0	1	150.000	1	150.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	900.000		
		4.06.18.002	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan						200.000		225.000		250.000		280.000		300.000		1.255.000	SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	1	200.000	1	225.000	1	250.000	1	280.000	1	300.000	5	1.255.000		
		4.06.18.003	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi						500.000		350.000		375.000		375.000		400.000		2.000.000	SUB BAGIAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Biro Perencanaan Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM																		
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	0	0	4	500.000	4	350.000	4	375.000	4	375.000	4	400.000	20	2.000.000		
		4.06.18.004	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan						440.000		440.000		440.000		440.000		440.000		2.200.000	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG KEUANGAN	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	Dokumen	0	0	1	440.000	1	440.000	1	440.000	1	440.000	1	440.000	5	2.200.000		
		4.06.18.005	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi						300.000		325.000		350.000		375.000		380.000		1.730.000	SUB BAGIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BIDANG JASA DAN PRODUKSI	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	0	0	2	300.000	2	325.000	2	350.000	2	375.000	2	380.000	10	1.730.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.06.18.006	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan						68.000		175.000		200.000		225.000		250.000		918.000	SUB BAGIAN PERHUBUNGAN	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	Dokumen	0	0	1	68.000	1	175.000	1	200.000	1	225.000	1	250.000	5	918.000		
		4.06.18.007	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata						150.000		175.000		200.000		225.000		250.000		1.000.000	SUB BAGIAN PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA	Biro Perencanaan Daerah
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	0	0	2	150.000	2	175.000	2	200.000	2	225.000	2	250.000	10	1.000.000		
		4.06.18.008	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan						300.000		300.000		325.000		350.000		375.000		1.650.000	SUB BAGIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAA	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			an Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan																	N DAN PERPUSTAKAAN	
				Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Laporan	0	0	1	300.000	1	300.000	1	325.000	1	350.000	1	375.000	5	1.650.000		
		4.06.18.009	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						160.000		125.000		200.000		225.000		250.000		960.000	SUB BAGIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	0	0	1	160.000	1	125.000	1	200.000	1	225.000	1	250.000	5	960.000		
		4.06.18.010	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi						95.000		160.000		250.000		300.000		325.000		1.130.000	SUB BAGIAN KESEHATAN	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Perangkat Daerah Bidang Kesehatan																		
				Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	Dokumen	0	0	1	95.000	1	160.000	1	250.000	1	300.000	1	325.000	5	1.130.000		
		4.06.18.011	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi						80.000		150.000		200.000		225.000		250.000		905.000	SUB BAGIAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	0	0	1	80.000	1	150.000	1	200.000	1	225.000	1	250.000	5	905.000		
		4.06.18.012	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian						75.000		125.000		195.000		225.000		250.000		870.000	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			yaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen		0	0	1	75.000	1	125.000	1	195.000	1	225.000	1	250.000	5	870.000			
		4.06.18.013	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil						75.000		125.000		150.000		200.000		250.000		800.000	SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Biro Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	Dokumen	0	0	1	75.000	1	125.000	1	150.000	1	200.000	1	250.000	5	800.000		
		4.06.18.015	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum						160.000		100.000		100.000		100.000		100.000		560.000	SUB BAGIAN TATA PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA	Biro Umum
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	Laporan	0	0	1	160.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	560.000		
		4.06.18.016	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						250.000		250.000		300.000		325.000		325.000		1.450.000	SUB BAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	0	0	2	250.000	2	250.000	2	300.000	2	325.000	2	325.000	10	1.450.000		
		4.06.18.017	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman						100.000		125.000		175.000		225.000		250.000		875.000	SUB BAGIAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	0	0	2	100.000	2	125.000	2	175.000	2	225.000	2	250.000	10	875.000		
		4.06.18.018	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup						100.000		125.000		200.000		225.000		250.000		900.000	SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			dan Kehutanan																		
				jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	0	0	1	100.000	1	125.000	1	200.000	1	225.000	1	250.000	5	900.000		
		4.06.18.019	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral						100.000		125.000		200.000		225.000		250.000		900.000	SUB BAGIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	Laporan	0	0	1	100.000	1	125.000	1	200.000	1	225.000	1	250.000	5	900.000		
		4.06.18.020	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah						120.000		150.000		225.000		250.000		300.000		1.045.000	SUB BAGIAN KETAHANAN PANGAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Bidang Ketahanan Pangan																		
				jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Ketahanan Pangan	Laporan	0	0	1	120.000	1	150.000	1	225.000	1	250.000	1	300.000	5	1.045.000		
		4.06.18.021	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan						80.000		185.000		225.000		250.000		300.000		1.040.000	SUB BAGIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Laporan	0	0	1	80.000	1	185.000	1	225.000	1	250.000	1	300.000	5	1.040.000		
		4.06.18.022	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan						150.000		175.000		225.000		250.000		300.000		1.100.000	SUB BAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Peternakan																		
				jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Laporan	0	0	2	150.000	2	175.000	2	225.000	2	250.000	2	300.000	10	1.100.000		
		4.01.19	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						2.134.729		2.630.200		3.030.200		3.330.200		3.530.200		14.655.529		
				Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
				Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
		4.06.19.001	Kegiatan administrasi penataan wilayah						774.700		842.470		1.000.000		1.000.000		1.050.000		4.667.170	SUB BAGIAN FASILITASI PENATAAN WILAYAH	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Permeri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																					ntahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
				Jumlah dokumen basis data rupabumi/toponimi yang disusun	Dokumen	1	1	1	98.000	1	168.494	1	200.000	1	200.000	1	210.000	5	876.494		
				Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	Dokumen	1	1	1	96.700	1	168.494	1	200.000	1	200.000	1	210.000	5	875.194		
				Jumlah dokumen penegasan batas daerah	Dokumen	0	0	2	580.000	2	505.482	2	600.000	2	600.000	2	630.000	10	2.915.482		
		4.06.19.002	Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan						281.100		400.000		500.200		600.200		650.200		2.431.700	SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	0	0	1	281.100	1	400.000	1	500.200	1	600.200	1	650.200	5	2.431.700		
		4.06.19.003	Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu						404.250		729.730		800.000		870.000		920.000		3.723.980	SUB BAGIAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERTANAHAN	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
				Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/konflik pertanahan	Laporan	0	0	1	202.125	1	364.865	1	400.000	1	435.000	1	460.000	5	1.861.990		
				Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	Laporan	0	0	1	202.125	1	364.865	1	400.000	1	435.000	1	460.000	5	1.861.990		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.06.19.004	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan						674.679		658.000		730.000		860.000		910.000		3.832.679	SUB BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
				Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	Wilayah	0	0	36	224.893	36	219.334	36	243.334	36	286.667	36	303.334	36	1.277.562		
				Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan	Wilayah	0	0	36	224.893	36	219.333	36	243.333	36	286.667	36	303.333	36	1.277.559		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK																	
				Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	0	0	36	224.893	36	219.333	36	243.333	36	286.666	36	303.333	36	1.277.558		
		4.01.20	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah						2.685.290		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		17.685.290		
				Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
				Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
		4.06.20.001	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah						1.573.950		1.846.000		1.500.000		2.000.000		2.250.000		9.169.950	SUB BAGIAN EVALUASI KINERJA PEMDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
																					Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
				Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov. Jateng dan Kab/Kota	Dokumen	0	0	13	1.173.950	13	1.200.000	13	1.000.000	13	1.300.000	13	1.500.000	65	6.173.950		
				Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	Dokumen	0	0	35	400.000	1	646.000	1	500.000	1	700.000	35	750.000	73	2.996.000		
		4.06.20.002	Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD						1.111.340		1.154.000		2.000.000		2.000.000		2.250.000		8.515.340	SUB BAGIAN FASILITASI KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
				Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	Dokumen	0	0	5	889.070	21	923.200	21	1.600.000	7	1.600.000	4	1.800.000	58	6.812.270		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah dokumen fasilitas PAW Anggota DPRD	Dokumen	0	0	30	222.270	5	230.800	20	400.000	30	400.000	30	450.000	115	1.703.070		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah			Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolalan dan Kehumasan	%	0	0	75		76		77		78		79		80			
		4.01.01	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						73.120.893		81.471.150		84.825.935		88.249.664		92.209.702		419.877.344		
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum,	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				kepegawaian dan keuangan Biro Isda																	Daya Alam	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	0	0	100		100		100		100		100		100			Biro Kesejahteraan Rakyat	
				Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	%	0	0	100		100		100		100		100		100			Biro Organisasi	
				Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100			Biro Umum	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	%	0	0	100		100		100		100		100		100			Biro Hukum	
				Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	%	0	0	100		100		100		100		100		100			Biro Perekonomian Daerah	
				Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100		100		100		100		100		100			Biro Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		4.01.01.001	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah						2.000.000		2.100.000		2.200.000		2.300.000		2.400.000		11.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	0	0	12	2.000.000	12	2.100.000	12	2.200.000	12	2.300.000	12	2.400.000	12	11.000.000		
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						95.000		101.650		108.765		116.379		124.525		546.319	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	95.000	12	101.650	12	108.765	12	116.379	12	124.525	12	546.319		
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						50.000		55.000		72.000		82.000		92.000		351.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	Bulan	0	0	12	50.000	12	55.000	12	72.000	12	82.000	12	92.000	12	351.000		
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah								40.000		50.000		55.000		55.000		200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	0		12	40.000	12	50.000	12	55.000	12	55.000	12	200.000		
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						30.000		40.000		45.000		50.000		55.000		220.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	Bulan	0	0	12	30.000	12	40.000	12	45.000	12	50.000	12	55.000	12	220.000		
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat						60.000		70.000		80.000		90.000		100.000		400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Daerah																		
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	12	60.000	12	70.000	12	80.000	12	90.000	12	100.000	12	400.000		
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						100.000		125.000		150.000		175.000		200.000		750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	0	0	12	100.000	12	125.000	12	150.000	12	175.000	12	200.000	12	750.000		
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						325.000		350.000		375.000		400.000		425.000		1.875.000	SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARI S DAERAH	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	325.000	12	350.000	12	375.000	12	400.000	12	425.000	12	1.875.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						200.000		210.000		220.000		230.000		240.000		1.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	12	12	200.000	12	210.000	12	220.000	12	230.000	12	240.000	12	1.100.000		
		4.01.01.002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah						174.893		250.000		250.000		250.000		250.000		1.174.893	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	0	0	12	174.893	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	1.174.893		
		4.01.01.003	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah						8.000.000		8.500.000		9.000.000		9.500.000		9.500.000		44.500.000	SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	8.000.000	12	8.500.000	12	9.000.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	44.500.000		
		4.01.01.004	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah						1.000.000		1.200.000		1.400.000		1.600.000		1.800.000		7.000.000	SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	1.000.000	12	1.200.000	12	1.400.000	12	1.600.000	12	1.800.000	12	7.000.000		
		4.01.01.005	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah						12.000.000		12.500.000		13.000.000		13.500.000		13.500.000		64.500.000	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	12	12	12.000.000	12	12.500.000	12	13.000.000	12	13.500.000	12	13.500.000	12	64.500.000		
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						350.000		425.000		450.000		500.000		550.000		2.275.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	12	12	350.000	12	425.000	12	450.000	12	500.000	12	550.000	12	2.275.000		
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						650.000		660.000		670.000		680.000		690.000		3.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	12	650.000	12	660.000	12	670.000	12	680.000	12	690.000	12	3.350.000		
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						400.000		428.000		457.000		490.000		524.000		2.299.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	400.000	12	428.000	12	457.000	12	490.000	12	524.000	12	2.299.000		
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						390.000		400.000		420.000		450.000		470.000		2.130.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	Bulan	12	12	12	390.000	12	400.000	12	420.000	12	450.000	12	470.000	12	2.130.000		
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						460.000		465.000		500.000		550.000		600.000		2.575.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Bulan	0	0	12	460.000	12	465.000	12	500.000	12	550.000	12	600.000	12	2.575.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				dalam dan luar daerah Biro Hukum																	
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah								635.000		650.000		700.000		800.000		2.785.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah	Bulan	0	0	0		12	635.000	12	650.000	12	700.000	12	800.000	12	2.785.000		
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						4.500.000		4.750.000		5.000.000		5.250.000		5.500.000		25.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	4.500.000	12	4.750.000	12	5.000.000	12	5.250.000	12	5.500.000	12	25.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						605.000		750.000		750.000		750.000		750.000		3.605.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	0	0	12	605.000	12	750.000	12	750.000	12	750.000	12	750.000	12	3.605.000		
		4.01.01.006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah						700.000		725.000		750.000		775.000		800.000		3.750.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	0	0	12	700.000	12	725.000	12	750.000	12	775.000	12	800.000	12	3.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						50.000		100.000		100.000		125.000		150.000		525.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	0	0	12	50.000	12	100.000	12	100.000	12	125.000	12	150.000	12	525.000		
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						8.634.000		9.000.000		10.000.000		11.000.000		11.000.000		49.634.000	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	8.634.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	11.000.000	12	49.634.000		
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah								50.000		90.000		95.000		95.000		330.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi	Bulan	0	0	0		12	50.000	12	90.000	12	95.000	12	95.000	12	330.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Pengadaan Barang/Jasa																	
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						12.000		25.000		30.000		35.000		40.000		142.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	0	0	12	12.000	12	25.000	12	30.000	12	35.000	12	40.000	12	142.000		
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						20.000		60.000		65.000		70.000		75.000		290.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	Bulan	0	0	12	20.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	12	290.000		
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						50.000		52.000		70.000		80.000		90.000		342.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	Bulan	0	0	12	50.000	12	52.000	12	70.000	12	80.000	12	90.000	12	342.000		
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						50.000		53.500		57.245		61.252		65.540		287.537	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	50.000	12	53.500	12	57.245	12	61.252	12	65.540	12	287.537		
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah						50.000		55.000		60.000		65.000		70.000		300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi
				Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	0	0	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	300.000		
		4.01.01.007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat						90.000		90.000		90.000		95.000		100.000		465.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Daerah																		
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	12	90.000	12	90.000	12	90.000	12	95.000	12	100.000	12	465.000		
		4.01.01.008	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah						200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		1.000.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	OPD Provinsi
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	1.000.000		
		4.01.01.010	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah						4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		27.500.000	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala	Bulan	12	12	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	12	27.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah																	
		4.01.01.011	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor						10.025.000		9.400.000		8.800.000		8.200.000		10.100.000		46.525.000	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi
				Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	Paket	10	10	10	10.025.000	10	9.400.000	10	8.800.000	10	8.200.000	10	10.100.000	10	46.525.000		
		4.01.01.013	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional						1.000.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		19.000.000	SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	2	5	5	1.000.000	5	4.500.000	5	4.500.000	5	4.500.000	5	4.500.000	25	19.000.000		
		4.01.01.014	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas						650.000		800.000		800.000		800.000		800.000		3.850.000	SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA	OPD Provinsi
				Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Set	165	165	800	650.000	900	800.000	900	800.000	400	800.000	900	800.000	3.900	3.850.000		
		4.01.01.015	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal						250.000		267.500		286.225		306.260		327.700		1.437.685	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	0	0	40	250.000	40	267.500	40	286.225	40	306.260	40	327.700	200	1.437.685		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.01.016	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah						200.000		250.000		250.000		250.000		250.000		1.200.000	SUB BAGIAN LIPUTAN DAN DOKUMENTASI	OPD Provinsi
				Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	0	0	4	200.000	4	250.000	4	250.000	4	250.000	4	250.000	20	1.200.000		
		4.01.01.020	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran						1.550.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		8.350.000	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	12	12	1.550.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	8.350.000		
		4.01.01.021	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah						8.650.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		46.650.000	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	8.650.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	9.500.000	12	46.650.000		
		4.01.01.022	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah						4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		27.500.000	SUB BAGIAN PELAYANAN RUMAH TANGGA	OPD Provinsi
				Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	12	27.500.000		
		4.01.01.023	Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah						550.000		588.500		629.700		673.773		720.937		3.162.910	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi
				Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	Bulan	12	12	12	550.000	12	588.500	12	629.700	12	673.773	12	720.937	12	3.162.910		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.01.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000		245.000		250.000		250.000		300.000		1.345.000		
				Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%	0	0	85		85		85		85		85		85		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
		4.01.02.001	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000		155.000		150.000		150.000		200.000		855.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	OPD Provinsi
				Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	Dokumen	1	2	1	200.000	1	155.000	1	150.000	1	150.000	2	200.000	6	855.000		
		4.01.02.002	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000		90.000		100.000		100.000		100.000		490.000	SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	OPD Provinsi
				Jumlah laporan evaluasi Setda	Dokumen	0	0	1	100.000	1	90.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	5	490.000		
		4.01.21	Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Humas						23.640.000		26.060.000		27.230.000		28.400.000		29.570.000		134.900.000		
				Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang	%	0	0	100		100		100		100		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				keagamaan di Pemprov Jawa Tengah																		
				Persentase layanan liputan dan keprotokolan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Biro Umum		
				Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Biro Umum		
		4.06.21.001	Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah						750.000		770.000		790.000		810.000		830.000		3.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	Biro Umum	
				Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	2	2	3	750.000		770.000		790.000		810.000		830.000		15	3.950.000		
		4.06.21.002	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan / makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah						450.000		500.000		550.000		600.000		650.000		2.750.000	SUB BAGIAN MATERI NASKAH PIMPINAN	Biro Umum	
				Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	Laporan	1.200	1.200	1.200	450.000		500.000		550.000		600.000		650.000		6.000	2.750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		4.06.21.003	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan						5.500.000		5.700.000		5.900.000		6.100.000		6.300.000		29.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA GUBERNUR	Biro Umum
				Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	Bulan	12	12	12	5.500.000	12	5.700.000	12	5.900.000	12	6.100.000	12	6.300.000	12	29.500.000		
		4.06.21.004	Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum						550.000		600.000		650.000		700.000		750.000		3.250.000	SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO	Biro Umum
				Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	Laporan	0	0	2	550.000	2	600.000	2	650.000	2	700.000	2	750.000	10	3.250.000		
		4.06.21.005	Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah						2.800.000		3.000.000		3.200.000		3.400.000		3.600.000		16.000.000	SUB BAGIAN LIPUTAN DAN DOKUMENTASI	Biro Umum
				Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	Bulan	12	12	12	2.800.000	12	3.000.000	12	3.200.000	12	3.400.000	12	3.600.000	12	16.000.000		
		4.06.21.006	Kegiatan Keprotokolan						1.750.000		1.850.000		1.950.000		2.050.000		2.150.000		9.750.000	SUB BAGIAN PROTOKOL	Biro Umum
				Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	Laporan	12	12	12	1.750.000	12	1.850.000	12	1.950.000	12	2.050.000	12	2.150.000	60	9.750.000		
		4.06.21.008	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian						1.640.000		1.840.000		2.040.000		2.240.000		2.440.000		10.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAS DAERAH	Biro Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017/2018)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Kebijakan Kepala Daerah																		
				Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Laporan	12	12	12	1.640.000	12	1.840.000	12	2.040.000	12	2.240.000	12	2.440.000	60	10.200.000		
		4.06.21.009	Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan						3.000.000		4.650.000		4.750.000		5.000.000		5.250.000		22.650.000	SUB BAGIAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Kesejahteraan Rakyat
				jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	Dokumen	0	0	1	1.600.000	1	2.325.000	1	2.375.000	1	2.500.000	1	2.625.000	5	11.425.000		
				jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	Laporan	0	0	1	1.400.000	1	2.325.000	1	2.375.000	1	2.500.000	1	2.625.000	5	11.225.000		
		4.06.21.010	Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah						7.200.000		7.150.000		7.400.000		7.500.000		7.600.000		36.850.000	SUB BAGIAN TATA PUBLIKASI DAN HUBUNGAN MEDIA	Biro Umum
				Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	Paket	0	0	144	7.200.000	144	7.150.000	144	7.400.000	144	7.500.000	144	7.600.000	720	36.850.000		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh sembilan biro sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing biro. Indikator Kinerja Utama menggambarkan tingkat capaian lingkup tujuan (Sekretariat Daerah) dan lingkup sasaran (Biro-biro). Untuk itu IKU harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	0	0	80	81	82	83	84	84
2	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	0	0	80	81	82	83	84	84
3	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	0	0	75	76	77	78	79	80
4	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	0	0	85	85	85	85	85	85
5	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	0	0	85	85	85	85	85	85
6	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	0	0	70	75	80	85	90	90
7	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	0	0	85	85	85	85	85	85
8	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	0	0	80	85	90	93	96	96
9	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	0	0	90	91	92	93	94	94
10	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	0	0	81	87	92	93	94	94
11	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	0	0	80	82	83	84	85	85
12	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	0	0	80	82	83	84	85	85
13	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan	%	0	0	80	81	82	83	84	84

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Bantuan Keuangan									
14	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	0	0	90	91	92	93	94	94
15	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	0	0	90	91	92	93	94	94
16	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	0	0	90	91	92	93	94	94
17	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	0	0	19	22	25	28	31	31
18	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	0	0	52,1	64,32	76,48	88,64	100	100
19	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	70	73	73	78	82	87	92	92
20	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	11	11,4	25	40	54	70	85	85
21	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	0	0	80	84	88	92	96	96
22	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	0	0	85	85	85	85	85	85
23	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	0	0	85	89	90	93	95	95
24	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	0	0	60	63	65	67	70	70
25	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	0	0	85	85	85	85	85	85
26	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	0	0	80	84	88	92	96	96
27	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	100	100	100	100	100	100
28	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	0	0	85	85	85	85	85	85
29	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	0	0	100	100	100	100	100	100
30	Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	0	0	100	100	100	100	100	100
31	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	0	0	100	100	100	100	100	100
32	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	0	0	75	76	77	78	79	80

Indikator kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa tengah.

Adapun Indikator kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 selanjutnya disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Umum
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Perekonomian Daerah
	Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan,	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Organisasi
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Hukum
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Perekonomian Daerah

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian										
	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah	Bulan	0	0	0	12	12	12	12	12	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Organisasi
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Hukum
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	Bulan	0	0	12	12	12	12	12	12	Biro Perekonomian Daerah
	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan	Bulan	0	0	0	12	12	12	12	12	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Barang/Jasa										
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	Paket	10	10	10	10	10	10	10	10	Biro Umum
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	2	5	5	5	5	5	5	25	Biro Umum
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Set	165	165	800	900	900	400	900	3900	Biro Umum
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	Orang	0	0	40	40	40	40	40	200	Biro Organisasi
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	0	0	4	4	4	4	4	20	Biro Umum
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Organisasi
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%	0	0	85	85	85	85	85	85	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	Dokumen	1	2	1	1	1	1	2	6	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Setda	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	0	0	85	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	%	0	0	85	85	85	85	85	85	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	100	90	80	85	90	93	96	96	Biro Perekonomian Daerah
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	100	90	83	85	88	90	93	93	Biro Perekonomian Daerah
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	100	90	80	80	80	80	80	80	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	5	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM	Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	0	0	4	4	4	4	4	20	Biro Perekonomian Daerah

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	Dokumen	0	0	5	5	5	5	5	25	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	0	0	3	3	3	3	3	15	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	Dokumen	0	0	3	3	3	3	3	15	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	0	0	3	3	3	3	3	15	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	0	0	3	3	3	3	3	15	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	0	0	1	2	2	2	2	9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Dokumen	0	0	3	2	3	2	3	13	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	Dokumen	93	132	50	50	50	50	50	250	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri	Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	0	0	90	91	92	93	94	94	Biro Hukum
	Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	0	0	90	91	92	93	94	94	Biro Hukum
Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	15	15	15	15	16	16	17	75	Biro Hukum
	Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Dokumen	0	0	100	110	120	130	140	600	Biro Hukum
Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dikaji	Dokumen	8	8	12	13	14	15	16	60	Biro Hukum
	Jumlah produk hukum yang disosialisasi	Dokumen	0	0	3	3	4	4	5	19	Biro Hukum
Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	0	0	85	87	88	89	90	90	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	%	0	0	80	82	83	84	85	85	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%	0	0	87	87	88	88	88	88	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	80	85	90	95	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	80	85	90	95	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	85	85	90	95	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
	presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	0	0	39	45	51	57	63	63	Biro Organisasi
	Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	75	80	83	84	85	85	86	86	Biro Organisasi
	Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	0	0	9.65	22.12	34.59	47.06	59.53	59.53	Biro Organisasi
	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	50	50	52.29	67.99	78.59	89.19	100	100	Biro Organisasi
	Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	60	64	68	74	83	92	100	100	Biro Organisasi
	Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%	14	14	28	42	57	71	85	85	Biro Organisasi
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%	0	0	90	91	92	93	94	94	Biro Hukum
	Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%	0	0	90	91	92	93	94	94	Biro Hukum
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%	0	0	90	91	92	93	94	94	Biro Hukum
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	0	0	90	91	92	93	94	94	Biro Hukum

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	90	85	89	90	93	95	95	Biro Perekonomian Daerah
	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	100	88	85	90	92	96	98	98	Biro Perekonomian Daerah
	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	80	85	90	95	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	85	85	90	95	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	%	0	0	85	85	90	95	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	88	87	90	93	95	97	97	Biro Perekonomian Daerah
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	0	0	90	91	92	93	95	95	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	0	0	70	73	76	79	80	80	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	%	0	0	70	73	76	79	80	80	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	0	0	14	23	31	40	48	48	Biro Organisasi

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	70	73	78	82	87	92	97	97	Biro Organisasi
Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	98.61	86.11	85	87	88	89	90	90	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	98.61	86.11	85	87	88	89	90	90	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	98.61	86.11	85	87	88	89	90	90	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah	Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	%	100	86	85	85	86	86	86	86	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan ULP Pemprov Jawa Tengah	Jumlah Dokumen SHB dan ASB	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	%	0	0	100	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	%	0	0	100	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	%	0	0	100	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	0	0	100	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	%	0	0	100	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	%	0	0	100	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	80	100	100	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	%	97.4	95	80	82	83	84	85	85	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	%	97.4	95	80	82	83	84	85	85	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Pengkajian Usulan Sinergitas Pembangunan Kabupaten/Kota	Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil II yang ditindaklanjuti	%	85	85	85	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil I yang ditindaklanjuti	%	85	85	85	0	0	0	0	0	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
	Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota	Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	%	0	72.28	70	0	0	0	0	70	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan	jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT	jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Perekonomian Daerah

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM	jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	0	0	3	3	3	3	3	15	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Keuangan	jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	Dokumen	0	0	4	4	4	4	4	20	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Jasa dan Produksi	jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	0	0	3	3	3	3	3	15	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan	jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata	jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan pariwisata	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan	Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	Dokumen	0	0	4	4	4	4	4	20	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	0	0	5	4	4	4	4	21	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	Laporan	0	0	4	3	3	3	3	16	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	Laporan	0	0	2	3	3	3	3	14	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan	jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	Laporan	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Laporan	0	0	7	6	7	6	7	33	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	35	35	35	Biro Organisasi
Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	OPD	48	48	48	48	48	48	48	48	Biro Organisasi
Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	35	35	35	Biro Organisasi
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	OPD	48	48	48	48	48	48	48	48	Biro Organisasi
Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik	jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	35	35	35	Biro Organisasi

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Unit	100	100	100	100	100	100	100	100	Biro Organisasi
Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	35	35	35	Biro Organisasi
	Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Unit	0	0	290	240	240	240	240	240	Biro Organisasi
Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	35	35	35	Biro Organisasi
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	OPD	48	48	48	48	48	48	48	48	Biro Organisasi
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	Kabupaten/Kota	35	35	35	35	35	35	35	35	Biro Organisasi
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	OPD	48	48	48	48	48	48	48	48	Biro Organisasi
Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	OPD	48	48	48	48	48	48	48	48	Biro Organisasi
Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	Dokumen	0	0	110	123	128	132	135	628	Biro Hukum
	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	Dokumen	0	0	115	127	132	138	140	652	Biro Hukum
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah	Jumlah produk hukum yang didokumentasi	Dokumen	0	0	90	90	90	90	90	450	Biro Hukum

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	Dokumen	0	0	60	65	70	75	80	350	Biro Hukum
	Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	Buku	0	0	150	150	150	150	150	750	Biro Hukum
Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	180	180	180	190	200	220	240	900	Biro Hukum
	Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	Perkara	6	6	8	9	9	10	10	40	Biro Hukum
	Penanganan sengketa hukum	Sengketa	0	0	4	5	6	7	8	20	Biro Hukum
Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK	Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Hukum
	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	Kabupaten/Kota	0	0	35	35	35	35	35	35	Biro Hukum
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Laporan	0	0	5	4	4	4	4	21	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	0	0	4	4	4	4	4	20	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan	Jumlah Dokumen SHB dan ASB	Dokumen	0	0	0	2	2	2	2	2	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	%	0	0	0	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	%	0	0	0	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	%	0	0	0	100	100	100	100	100	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	90	80	83	85	89	90	90	Biro Perekonomian Daerah
	Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	100	90	80	82	85	88	90	90	Biro Perekonomian Daerah
	Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	80	85	90	95	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	80	85	90	95	100	100	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	0	0	85	85	90	95	100	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	92	82	85	87	90	92	92	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	0	0	4	4	4	4	4	20	Biro Perekonomian Daerah

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Perekonomian Daerah
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	dan Kependudukan dan catatan Sipil										
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Umum
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Ketahanan Pangan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Laporan	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Kegiatan administrasi penataan wilayah	Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Jumlah dokumen penegasan batas daerah	Dokumen	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu	Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	Wilayah	0	0	36	36	36	36	36	36	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	0	0	36	36	36	36	36	36	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	0	0	36	36	36	36	36	36	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum	Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	Laporan	0	0	2	2	2	2	2	10	Biro Umum
Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah	Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Biro Umum
Kegiatan Keprotokolan	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	60	Biro Umum
Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	60	Biro Umum
Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan	jumlah laporan pmdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
	jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	5	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	Paket	0	0	144	144	144	144	144	720	Biro Umum

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2023 ini mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menghadirkan keselarasan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Jawa Tengah pada periode lima tahun (RPJMD) dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, merupakan panduan bagi sembilan Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan terkait guna melaksanakan dan mendukung pencapaian pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib berpedoman pada Renstra dalam menyusun Renja dan Rencana Kinerja Tahunan.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.